

Paper_1

by Tesis Mip Uwks

Submission date: 22-Mar-2021 06:57PM (UTC-0700)

Submission ID: 1539888529

File name: Tesis_-_Johni_Sukwanto.docx (3.11M)

Word count: 24267

Character count: 154405

**EFEKTIVITAS APLIKASI e-PLANNING²⁵ DALAM PROSES
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
DI KABUPATEN GRESIK**

**114
TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik**



Oleh :

**JOHNI SUKWANTO
NPM. 19550004**

**36
PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

**EFEKTIVITAS APLIKASI e-PLANNING²⁵ DALAM PROSES
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
DI KABUPATEN GRESIK**

114
TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik**



Oleh :

JOHNI SUKWANTO
NPM. 19550004

36
**PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

25

EFEKTIVITAS APLIKASI e-PLANNING DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DI KABUPATEN GRESIK

Oleh :

JOHNI SUKWANTO

Telah dipertahankan didepan penguji dan telah memenuhi syarat
pada tanggal 27 Januari 2021

Menyetujui,
Komite Dosen Pembimbing,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ttd

Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si

Ttd

Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si

Komite Dewan Penguji,

Ketua Dewan Penguji,

Ttd

Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si

Anggota,

Ttd

Dr. Ratna Ani Lestari, S.E.,M.M

Anggota,

Ttd

Dr. Yenik Pujowati, S.A.P., M.A.P

50

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ttd

Drs. Sucahyo Tri Budiono.,M.Si

HALAMAN IDENTITAS PENGUJI TESIS

Judul Tesis :

**EFEKTIVITAS APLIKASI ²⁵ *e-PLANNING* DALAM PROSES
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
DI KABUPATEN GRESIK**

Nama Mahasiswa : Johni Sukwanto
NPM : 19550004
Komite Dosen Pembimbing,
Pembimbing Utama : Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si
NIK/NIDN : 18794-ET
Pembimbing Pendamping : Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si
NIK/NIDN : 18808-ET

Komite Dewan Penguji,
Ketua Dewan Penguji : Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si
NIK/NIDN : 18794-ET
Anggota Dewan Penguji : Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si
NIK/NIDN : 18808-ET
Anggota Dewan Penguji : Dr. Ratna Ani Lestari, S.E.,M.M
NIK/NIDN : 11562-ET
Anggota Dewan Penguji : Dr. Yenik Pujowati, S.A.P., M.A.P
NIK/NIDN : 115440 – ET

Ruang Ujian :
Tanggal Ujian :
SK Penguji :

Surabaya, 27 Januari 2021
Kaprodi Program Studi Magister Ilmu Politik
Ttd ²⁴
Dr. Darsono., M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia TESIS PROGRAM MASGISTER ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Surabaya, 27 Januari 2021

Materai Rp. 6.000,-

Johni Sukwanto
NPM. 19550004

RIWAYAT HIDUP

Johni Sukwanto, lahir di Lamongan, 16 September 1971

Anak dari Bapak Sarma'i (almarhum) dan Ibu Yani (almarhumah).

Bertempat tinggal di Perumahan Dinari 2 Blok E – 208 RT. 05 / RW. 05 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Korespondensi melalui nomor telepon 081357323598

Alamat Email yaitu sukwantojohni@gmail.com

Pengalaman kerja sebagai staf di Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gresik tahun 1995 – 2008, sebagai staf di Sub Bagian Kepegawaian pada Setda Kabupaten Gresik tahun 2008 – 2009, sebagai staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BAPPEDA Kabupaten Gresik tahun 2013 – 2015, sebagai ¹²⁵Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BAPPEDA Kabupaten Gresik tahun 2015 - 2017, sebagai bendahara pengeluaran pada BAPPEDA Kabupaten Gresik tahun 2017 – sekarang.

Pengalaman berorganisasi sebagai Sekretaris Pengurus TK Muslimat Al Ikhlas 199 Perum Griya Suci Permai Gresik tahun 1997 – 1999, Senat Mahasiswa sebagai Ketua Koperasi Mahasiswa di Universitas Gresik tahun 1997 – 2000, sebagai Pembina Pramuka di SDN Randu Agung III Kebomas Gresik tahun 1998 – 1999, sebagai Anggota Kepramukaan Iwa Sumantri Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung 2010 – 2013, sebagai ⁹⁵Anggota Satuan Bhakti Sosial Mahasiswa (SBSM) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 2010 – 2013, sebagai Ketua Dewan Penasehat Anggota (DPA) ⁹⁵Satuan Bhakti Sosial Mahasiswa (SBSM) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 2012 – 2013.

Prestasi akademik yaitu sebagai penerima beasiswa dari Kementerian Sosial pendidikan tugas belajar pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung dari Kementerian Sosial tahun 2009 – 2013

Prestasi non – akademik yaitu peserta terbaik Diklat Mitigasi Bencana yang di ikuti beberapa Kabupaten /Kota di Indonesia di Universitas Syahkuala Banda Aceh beasiswa pendidikan non gelar dari BAPPENAS tahun 2015.

Surabaya, 27 Januari 2021

Ttd

Johni Sukwanto

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya tesis ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Penulis pernah bersepakat dengan teman-teman seangkatan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pernah berkata, “ jika ingin lulus bersama dan tepat waktu,” maka harus pegang komitmen dan disiplin untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, diwaktu yang tepat.

Tesis atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu, Sarma'i(almarhum) dan Yani (almarhumah) terimakasih yang telah mengasuh dan mendidik serta mendoakan, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang dimasa hidup beliau yang tidak pernah henti hingga penulis bisa seperti sekarang ini.
- Bapak dan Ibu mertua, Mulyono dan Arifah terimakasih yang telah mendoakan, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti hingga penulis bisa seperti sekarang ini.
- Istriku tercinta (Lilik Setiyowati) dan kedua putraku (Yoga Setya Perdana dan Febrian Dwi Putra Nugraha) terima kasih telah mendoakan,

⁶⁵ semangat, motivasi, pengorbanan, saran masukan serta kasih sayang yang tidak pernah henti.

- Adikku Sarwo Eddy Sukokaryono dan Triwahyuni Oktavia, ⁷terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Keluarga Besar Bappeda (bapak Drs. Hermanto TH. Sianturi) dan semua karyawan dan Karyawati yang ²⁷tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
- Dosen Pembimbing bapak Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si dan bapak Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si ⁷yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena kehendak dan ridhaNya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti sadari tesis ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

36

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Bapak Drs. Suchyo Tri Budiono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

79

2. Bapak Dr. Darsono, Drs., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

32

3. Bapak Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.

4. Bapak Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.

38

5. Ibu Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian tesis ini.

54

6. Ibu Dr. Yenik Pujowati, S.A.P., M.A.P selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian tesis ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kabupaten Gresik, terima kasih telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang penulis butuhkan.
10. Ibu Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kabupaten Gresik, terima kasih telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang penulis butuhkan.
11. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Gresik, terima kasih telah memberikan dan membantu data-data yang penulis butuhkan.
12. Seluruh teman-teman di BAPPEDA Kabupaten Gresik, terima kasih telah membantu penulis mulai dari persiapan sampai terselesainya tesis ini.
13. Seluruh Kasub Bagian Program dan Pelaporan OPD dilingkup pemerintah kabupaten Gresik, terima kasih atas bantuannya,
14. Istri dan kedua putraku tercinta yang selalu memberi semangat, dorongan dan dukungan serta doa untuk keberhasilan penulis.

Penulis

ABSTRAK

Johni Sukwanto. 2021. “Efektivitas Aplikasi *E-Planning* dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik”. Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pembimbing Utama: Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si. Pembimbing Pendamping: Dr. Sugeng Pujileksono, Drs.,M.Si.

Dilabelakangi seringnya terjadinya ketidak tepatan waktu penyelesaian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, yang selalu terjadi tarik ulur antara eksekutif dan legislatif sehingga akan berpengaruh terhadap penetapan dokumen-dokumen anggaran lainnya seperti KUA PPAS, RKA, DPA, APBD dan lain-lain yang dapat mengganggu kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik. Dalam perencanaan pembangunan daerah ada empat pendekatan yaitu :

- (1) Pendekatan teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis, menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, melalui musawarah Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Konsep efektivitas dalam aplikasi *e-planning* yang terbagi menjadi tiga pengukuran, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu, dengan melakukan wawancara secara mendalam, melakukan observasi, mengedarkan angket kepada responden, studi pustaka dan data-data serta bukti-bukti fakta yang ada di lapangan yang dapat mendukung atau membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian kuantitatif. Dengan subjek penelitian yang diwawancarai secara mendalam, data dianalisis secara kuantitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa :

- (1) Aplikasi *e-planning* sangat membantu BAPPEDA dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik
- (2) Dari sisi kualitas aplikasi *e-planning* memiliki kualitas yang dapat di pertanggungjawabkan
- (3) Dari sisi kuantitas aplikasi *e-planning* dapat menampung usulan lebih banyak dan usulan tahun sebelumnya yang belum diakomodir sehingga dapat di usulkan pada tahun berikutnya
- (4) Dari sisi waktu, waktu yang di butuhkan untuk mengusulkan pembangunan daerah lebih singkat dan tidak perlu di antar ke Bappeda cukup melalui on line.

Kata Kunci: efektivitas aplikasi *e-planning* dalam penyusunan RKPD

ABSTRACT

Johni Sukwanto. 2021. "The Effectiveness of E-Planning Applications in the Process of Preparing Local Government Work Plans (RKPD) in Gresik Regency". Master Program in Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Wijaya Kusuma University, Surabaya. Main Advisor: Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si. Associate Advisor: Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si.

This is based on the frequent inaccuracies in the completion time in the preparation of the Regional Government Work Plan (RKPD) in 2019, which has always been a tug-of-war between the executive and the legislature so that it will affect the determination of other budget documents such as KUA PPAS, RKA, DPA, APBD and others. others that can disrupt regional development activities in Gresik Regency. In regional development planning there are four approaches, namely:

- (1) A technocratic approach, using scientific methods and frameworks to achieve regional development goals and objectives.
- (2) A participatory approach is carried out by involving various stakeholders.
- (3) Political approach, translating the vision and mission of the elected regional head into a medium-term development planning document which is discussed with the DPRD.
- (4) Top-down and bottom-up approaches, through village, sub-district, regency / city, provincial, and national meetings.

The concept of effectiveness in the e-planning application is divided into three measurements, namely quality, quantity, and time, by conducting in-depth interviews, making observations, distributing questionnaires to respondents, literature studies and data as well as evidence of facts in the field which can support or assist researchers in carrying out quantitative research. With research subjects who were interviewed in depth, the data were analyzed quantitatively. The findings of this study indicate that:

- (1) The e-planning application really helps BAPPEDA in the preparation of the RKPD in Gresik Regency
- (2) In terms of quality, e-planning application has a quality that can be accounted for
- (3) In terms of quantity, the e-planning application can accommodate more proposals and suggestions from the previous year that have not been accommodated so that they can be proposed in the following year
- (4) In terms of time, the time needed to propose regional development is shorter and does not need to be sent to Bappeda by simply going on line.

Keywords: effectiveness of e-planning applications in the preparation of RKPD

SUMMARY

The e-Planning application is expected to be able to produce a quality Local Government Work Plan (RKPD) because it is used as a reference for all regional apparatus in carrying out programs and activities for the next one year so that the goals and objectives of the regional apparatus will be as planned. However, in its application, several problems are still found, including:

- (1) Development planning is still not completely transparent, because the community cannot know or have not received clear and accurate information related to the formulation of regional development planning so that community participation and participation cannot be felt.
- (2) Inadequate human resources so that OPD / District and Village operators are still not optimal in utilizing technological advances in development planning. Development planning proposals are made manually and through written representation through lower levels of government. So that development planning requires a long time and process.
- (3) Regional development planning is still not integrated, so that regional development planning is still not effective and efficient.
- (4) The time interval agreed upon in the RKPD preparation process is often violated by DPRD members who wish to propose the main ideas of DPRD members.

Conceptually, the formulation of regional development plans in the principles of planning, controlling, and evaluating regional development is realized for strategic and operational development planning based on development objectives and targets that are harmonized with the authority of local governments as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government includes obligatory basic service affairs, mandatory non-basic service affairs, optional affairs, as well as supporting affairs. Meanwhile, the alignment of national and regional development priorities based on these principles begins with the synchronization of strategic issues, development targets and priority programs as outlined in working papers and regional development plan documents. Meanwhile, the formulation of regional development priorities is prepared to cover governmental administration affairs which are stipulated in the form of priority development programs I and II and have been proclaimed for 5 (five) years for medium term planning or RPJMD.

Judging from the development planning approach according to Permendagri of 2017 concerning Procedures for Planning, Control and Evaluation of Regional Development, Procedures for Evaluating Draft Regional Regulations concerning RPJPD, RPJMD, RKPD and Procedures for Changing RPJPD, RPJMD, and RKPD Appendix E Control and Evaluation Procedures Regional Development, the planning approach is divided into 4 (four), namely:

- (1) The technocratic approach in Regional development planning as referred to in Article 7 letter a, is implemented using scientific methods and frameworks to achieve the goals and objectives of Regional development.
- (2) The participatory approach as referred to in Article 7 letter b, is implemented by involving various stakeholders.

- (3) The political approach ¹⁰⁸ as referred to in Article 7 letter c, is implemented by translating the vision and mission of the elected Regional Head into a medium-term development planning document which is discussed with DPRD.
- (4) The top-down and bottom-up approach ¹⁰⁷ as referred to in Article 7 letter d is the result of planning that is harmonized in development deliberations which are carried out starting from the Village, District, Regency / City Region, Provincial Region to the national level.

RINGKASAN

Aplikasi *e-Planning* diharapkan mampu menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas karena digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan selama satu tahun ke depan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah akan sesuai dengan yang direncanakan. Namun pada penerapannya hingga saat ini masih di temukan beberapa permasalahan antara lain :

- (1) Dalam perencanaan pembangunan masih belum benar-benar transparan, karena masyarakat tidak dapat mengetahui atau belum mendapat informasi yang jelas dan akurat terkait dengan rumusan perencanaan pembangunan daerah sehingga partisipasi dan keikutsertaan masyarakat kurang dapat di rasakan.
- (2) Sumber daya manusia yang belum memadai sehingga para operator OPD / Kecamatan dan Desa masih belum optimal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam perencanaan pembangunan. Usulan-usulan perencanaan pembangunan dilakukan secara manual dan melalui perwakilan dalam bentuk tertulis melalui pemerintahan tingkat bawah. Sehingga Perencanaan pembangunan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah masih belum terintegrasi, sehingga perencanaan pembangunan daerah masih belum efektif dan efisien.
- (4) Interval waktu yang disepakati dalam proses penyusunan RKPD sering dilanggar oleh anggota DPRD yang ingin mengajukan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Sementara itu, perumusan rencana pembangunan daerah dalam kaidah tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah diwujudkan untuk perencanaan pembangunan strategis dan operasional berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharmonisasikan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun urusan penunjang. Sedangkan penyalarsan prioritas pembangunan nasional daerah berlandaskan kaidah dimaksud dimulai dari sinkronisasi isu-isu strategis, sasaran pembangunan, dan program prioritas yang dituangkan dalam kertas kerja dan dokumen rencana pembangunan daerah. Sedangkan rumusan prioritas pembangunan daerah disusun mencakup urusan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dalam bentuk program-program pembangunan prioritas I dan II serta sudah dicanangkan selama 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah atau RPJMD.

Ditinjau dari pendekatan perencanaan pembangunan menurut Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, RKPD serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD Lampiran E Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pendekatan perencanaan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Efektifitas Aplikasi *E-Planning* Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik.”**

32

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

38

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini memerlukan bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak.

57

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

32

Surabaya, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS	i
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
SUMMARY	xii
RINGKASAN	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR BAGAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Rumusan Hipotesis	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Batasan / Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini	11
2.2 Keterbatasan Peneliti	19
2.3 Kajian Teori	19
2.3.1 Konsep Efektivitas	19
2.3.2 Teori Perencanaan (<i>Planning</i>)	21

2.3.3	Definis <i>E-planning</i>	22
2.3.4	Definis Pemerintah Daerah	22
2.3.5	Penerapan Aplikasi <i>E-planning</i>	23
2.3.6	Aplikasi <i>E-Planning</i> dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	24
	27
2.3.7.	Pengaturan Indikator Kinerja dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dengan <i>E-Planning</i> ..	27
2.3	Kerangka Berpikir	33
23	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1	Jenis Penelitian (Desain Penelitian)	35
3.2	Objek Penelitian	36
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.4.1	Kuesioner (<i>questionnaires</i>).....	37
3.4.2	Wawancara	38
3.4.3	Observasi	39
3.4.4	Studi Dokumentasi.....	40
3.4.5	Variabel Penelitian.....	40
3.4.6	Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel	40
3.5	Populasi dan Sampel	41
3.5.1	Populasi.....	41
3.5.2	Sampel	42
3.6	Teknik Analisis Data	44
3.6.1	Uji Validitas	49
3.6.2	Uji Reliabilitas	49
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	50
3.6.4	Analisis Korelasi Berganda	50
3.6.5	Uji Hipotesis	50
3.6.6	Analisis Koefisien Determinasi Simultan.....	52
3.6.7	Analisis Koefisien Determinasi Parsial	52

3.7 Sumber Data	52
17 3.8 Teknik Analisis Data	53
3.8.1. Teknik Uji Prasyarat Analisis	53
3.8.1.1. Uji Normalitas	54
16 3.8.1.2. Analisis Regresi Linier Sederhana	54
3.8.1.3 Uji Prasyarat Regresi	54
3.8.1.3.1 Uji Linieritas	55
3.8.1.3.2. Uji Multikolinieritas	55
3.8.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas	55
3.8.1.3.4. Uji Autokorelasi	56
3.8.1.4. Teknik Uji Analisis	57
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	58
4.1 Lokasi Penelitian	58
4.2 Pemanfaatan <i>e-Planning</i> dalam Penyusunan RKPD	62
4.2.1. Penjelasan Fitur <i>e-Planning</i> dilengkapi/di dukung screenshot	62
4.3 Penjelasan Pemanfaatan <i>e-Planning</i> dalam Tahapan RKPD	73
4.4 Penjelasan Pemanfaatan <i>e-Planning</i> dalam Pengajuan POKIR	76
11 4.5 Model Penerapan Aplikasi <i>e-Planning</i> dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	77
4.6 Analisa strategi kelebihan dan kekurangan dengan analisis SWOT	79
4.7 Efektivitas Aplikasi <i>E-Planning</i> dalam Proses Penyusunan RKPD	82
7 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
5.1 Deskripsi Objek Penelitian	84
5.1.1 Deskripsi Data	85
26 5.1.1.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
5.1.1.2 Data Responden Berdasarkan Usia	86
5.1.1.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	87
5.1.1.4 Data Responden Berdasarkan Posisi Terakhir	87
5.1.1.5 Data Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja	88

5.2 Metode Analisis Data	89
³⁰ 5.2.1. Statistik Deskriptif	89
5.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	89
5.2.2.1 Uji Validitas	89
5.2.2.2 Uji Reliabilitas	93
5.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	94
5.2.3.1 Uji Normalitas	95
5.2.3.2 Uji Multikolinieritas	95
5.2.3.3. Uji Homogenistisitas Berdasar Jenis Kelamin	96
³⁰ 5.2.3.4 Uji Homogenistisitas berdasar Jenis Usia	96
5.2.4. Uji Hipotesis	97
5.2.4.1 Hasil Uji Regresi Berganda.....	97
5.2.4.2 Hasil Uji F.....	99
5.2.4.3 Hasil Uji T.....	101
5.3 Pembahasan	102
²⁹ 5.3.1. Pengaruh Efektivitas Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	102
²⁹ 5.3.2. Pengaruh Kualitas Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	103
²⁹ 5.3.3 Pengaruh Kuantitas Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	104
²⁹ 5.3.4. Pengaruh Waktu Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	104
BAB VI DISKUSI DAN TEMUAN TEORITIK	106
¹⁷ 6.1 Peran dan Fungsi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Pembangunan Daerah	107
6.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	111
⁴ 6.4 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	115
6.5 Penyusunan KUA-PPAS Sebagai Pedoman dalam Penyusunan APBD ...	117
BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI	120
7.1. Kesimpulan	120

7.1.1 Peranan ² Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kabupaten Gresik.....	121
7.1.2 Manfaat Aplikasi <i>e-Planning</i> dalam Penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik.....	122
7.2 Saran	123
7.3 Rekomendasi	125
7.3.1 Implikasi Teoritis dan Urgensi Penelitian	126
7.3.1.1. Implikasi Teoritis Penelitian	126
7.3.1.2. Urgensi Penelitian	129
7.3.2 Keterbatasan Penelitian.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Relevansi Antara Hasil Penelitian Andani Tahun 2019	17
Tabel 2.2 Relevansi Antara Hasil Penelitian	18
Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4 Iktishar ¹³⁹ Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Permendagri 86 Tahun 2017 .	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5 Rekomendasi Penetapan Indikator Kinerja dan Hierarki Indikator Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Pengukuran Terhadap Variabel Independen	38
Tabel 3.2 Contoh Lembar Pengamatan untuk Mengukur Efektivitas Aplikasi Eplanning dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	39
Tabel 3.3 Populasi Pada Bappeda Organisasi Perangkat Daerah	41
Tabel 3.3 Rekapitulasi dari Hasil Pengumpulan Kuesioner pada Karyawan Bappeda Kabupaten Gresik	44
Tabel 3.4 Rekapitulasi dari Hasil Pengumpulan Kuesioner pada Kasub Bagian Program dan Pelaporan Kabupaten Gresik	45
Tabel 3.5 Kuantitas dari responden pegawai Bappeda dan OPD.....	46
Tabel 3.6 Kualitas dari responden pegawai Bappeda dan OPD.....	47
Tabel 3.7 Ketepatan Waktu dari responden pegawai Bappeda dan OPD	48
Tabel 3.8 Efektivitas dari responden pegawai Bappeda dan OPD.....	48
Tabel 3.4 Kriteria Interpretasi koefisien Korelasi ¹²¹ Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.5 Kerja Analisis Regresi Berganda	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 ² Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik, 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.1 ¹⁶ Data Distribusi Sampel Penelitian	85
Tabel 5.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
Tabel 5.4 ³⁰ Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	87
Tabel 5.5 Data responden Berdasarkan Posisi Terakhir	87

Tabel 5.6 Data Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja	88
Tabel 5.7 Statistik Deskriptif	89
Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas	90
Tabel 5.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas	91
Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel Kuantitas.....	92
Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Waktu	92
Tabel 5.12 Hasil Uji Reliabilitas	94
Tabel 5.13 Hasil Uji Normalitas	95
Tabel 5.14 Hasil Uji Multikolinearitas	95
Tabel 5.15 Hasil Uji Homogenistisitas berdasar Jenis Kelamin	96
Tabel 5.16 Hasil Uji Homogenistisitas berdasar Jenis Usia	97
Tabel 5.17 Hasil Uji Hipotesis	97
Tabel 5.17 Hasil Uji F.....	100
Tabel 5.18 Hasil Uji t.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.4.1. Alur Kerja Usulan Desa dan Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang.....	24
Gambar 2.2.4.2. Alur Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	25
Gambar 2.2.4.3. Pengguna Aplikasi E-planning di Kabupaten Gresik.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA Gresik	59
Gambar 4.2 Jumlah Proyek Investasi di Kabupaten Gresik,2017.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 4.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah, 2017	61
Gambar 4.4 Volume Ekspor dan Nilai Ekspor di Pelabuhan Ekspor Gresik	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 4.5 Volume Impor dan Nilai Impor di Pelabuhan Gresik	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 4.6 Screenshoot menu Visi Gb. 3.1.1	62
Gambar 4.7 Screenshoot isian Visi Gb. 3.1.2	63
Gambar 4.8 Screenshoot menu Misi Gb. 3.1.3	63
Gambar 4.9 Screenshoot isian Misi Gb. 3.1.4.....	64
Gambar 4.10 Screenshoot menu Tujuan Gb. 3.1.5	65
Gambar 4.11 Screenshoot Tujuan sudah terisi Gb. 3.1.6.....	65
Gambar 4.12 Screenshoot menu Sasaran Gb. 3.1.7	66
Gambar 4.13 Screenshoot Sasaran sudah terisi Gb. 3.1.8.....	66
Gambar 4.14 Screenshoot menu Indikator Sasaran Gb. 3.1.9.	67
Gambar 4.15 Screenshoot Indikator Sasaran sudah terisi Gb. 3.2.0	67
Gambar 4.16 Screenshoot menu Strategi dan arah kebijakan Gb. 3.2.1.....	68
Gambar 4.17 Screenshoot Strategi dan arah kebijakan sudah terisi Gb. 3.2.2.	68
Gambar 4.18 Screenshoot menu Program dan kegiatan Gb. 3.2.3.	69
Gambar 4.19 Screenshoot Program dan kegiatan sudah terisi Gb. 3.2.4.	69
Gambar 4.20 Screenshoot menu Pokok Pikiran Dewan 3.2.5.	70

Gambar 4.21 Screenshoot Pokok Pikiran Dewan yang sudah terisi Gb. 3.2.6.	70
Gambar 4.22 Screenshoot user name untuk per masing-masing anggota dewan 3.2.7.....	71
Gambar 4.23 Screenshoot menu Usulan Masyarakat Desa/Kelurahan Gb. 3.2.8.	72
Gambar 4.24 Screenshoot menu Usulan Masyarakat Kecamatan Gb. 3.2.9.....	72
Gambar 4.25 Screenshoot user name untuk masing-masing Desa/Kelurahan Gb. 3.3.0.....	73
Gambar 4.26 Screenshoot user name untuk masing-masing Kecamatan Gb. 3.3.1.	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.1. Bagan Desain Penelitian	36
Bagan 6.1 Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD	109

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun mulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang di entry melalui aplikasi *e planning*. Penelitian tentang aplikasi *eplanning* merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dalam perencanaan pembangunan, kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan pemanfaatan aplikasi *eplanning* agar kinerja pegawai lebih efektif, efisien, kualitas, kuantitas dan waktu. Tahapan aplikasi *eplanning* di Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- 1) Input, pada tahap ini meliputi entry data usulan perencanaan pembangunan yang diawali dari usulan desa.
- 2) Proses, pada tahap proses ini meliputi murenbang kecamatan, forum SKPD, murenbang Kabupaten untuk menginventarisir dan memverifikasi untuk menentukan layak dan tidak layak.
- 3) Output, pada tahap ini memasukkan usulan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai dari usulan draft RKPD, draft KUA, draft PPAS sampai dengan penetapan.
- 4) Outcome, pada tahap ini merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

5) Impact, merupakan akibat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Dengan aplikasi *eplanning* maka beban dan tugas BAPPEDA menjadi lebih mudah dan ringan dalam rangka mengawal perencanaan pembangunan, karena setiap usulan pembangunan tidak akan lolos jika melalui tahapan proses entry ke dalam aplikasi *e-planning*. Tidak ada lagi program atau kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui proses dari *e-planning*, jika hal tersebut sampai dilakukan maka pasti akan mengundang masalah karena Tim Pemeriksa dari BPK selalu memantau proses perencanaan mulai dari desa sampai dengan tersusunnya RKPD.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tentunya dapat dilihat dari proses perencanaan yang baik, perencanaan sebagai alat koordinasi stake holder dalam menyusun dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan. Landasan regulasi multidimensi yang diatur secara sektoral oleh berbagai kementerian. Harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah menjadi domain Kementerian PPN atau Bappenas, sedangkan susunan/tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur oleh Kemendagri. Adapun penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyusunan rencana pembangunan daerah menjadi kewenangan utama Kemen PAN RB. Lebih lanjut, pengaturan prioritas pembangunan sektoral mempertimbangkan rencana strategis kementerian sektoral lainnya.

Secara konseptual, rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di setiap jenjang pemerintahan yang lahir berlandaskan

SPPN bertujuan menghadirkan keselarasan pembangunan nasional dan daerah. Harmonisasi perencanaan pembangunan diwujudkan untuk mendorong pembangunan daerah atau regional agar mendukung sasaran prioritas yang ditetapkan secara nasional baik secara tematik maupun kewilayahan.

Untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah maka pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan kinerja dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menata administrasi dan tepat waktu dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

E-Planning diharapkan mampu menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan selama satu tahun ke depan, walaupun dalam praktiknya masih di temukan beberapa permasalahan antara lain :

1. Perencanaan pembangunan transparan, sehingga masyarakat tidak mengetahui karena belum mendapat informasi terkait dengan rumusan perencanaan pembangunan daerah sehingga partisipasi dan keikutsertaan masyarakat kurang dapat di rasakan.
2. Sumber daya manusia yang belum memadai sehingga para operator OPD / Kecamatan dan Desa belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam perencanaan pembangunan secara optimal.

3. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi *eplanning* sudah cukup efektif walaupun masih ada kekurangan yang dimiliki aplikasi *eplanning* salah satunya yaitu belum terintegrasi dengan *ebudgeting*, sehingga aplikasi *eplanning* dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah masih kurang efektif dan efisien.
4. Interval waktu yang disepakati dalam proses penyusunan RKPD sering dilanggar oleh anggota DPRD yang ingin mengajukan ¹⁸ pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Secara konseptual, perumusan rencana pembangunan daerah dalam kaidah dan tahapan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah diwujudkan untuk perencanaan pembangunan strategis dan operasional berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharmonisasikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan penyaluran prioritas pembangunan nasional dan daerah berlandaskan kaidah dimaksud dimulai dari sinkronisasi isu-isu strategis, sasaran pembangunan, dan program prioritas yang dituangkan dalam kertas kerja dan dokumen rencana pembangunan daerah. Sedangkan rumusan prioritas pembangunan daerah disusun mencakup urusan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dalam bentuk program-program pembangunan prioritas I dan II serta sudah dicanangkan selama 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah atau RPJMD.

Ditinjau dari pendekatan perencanaan pembangunan menurut Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa pendekatan perencanaan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- (1) Pendekatan teknokratik
- (2) Pendekatan partisipatif
- (3) Pendekatan politis
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas

Berlandaskan arsitektur dan pendekatan perencanaan dimaksud, pada periode pemerintahan 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Gresik melahirkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015. Harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mensinkronisasikan isu-isu strategis, program prioritas dan kebijakan nasional maupun regional, hingga kearifan lokal serta menelaah permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015. Selain itu, dalam kaidah pelaksanaannya, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 merupakan masa transisi yang mengakomodasi berbagai perubahan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai perubahan urusan penyelenggaraan pemerintahan, perubahan struktur organisasi perangkat daerah, perubahan pengukuran akuntabilitas kinerja, hingga mekanisme budget follow programs.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Gresik pada periode Tahun 2016-2021 selain konsep substantif perencanaan yang mampu mengintegrasikan kaidah-kaidah perencanaan tetapi juga didukung dengan penggunaan teknologi yaitu *e-planning*, dengan pemanfaatan teknologi *e-planning* untuk memudahkan perencana dalam melaksanakan berbagai tahapan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan serta mensinkronisasikan berbagai pendekatan perencanaan terutama pendekatan politis dari pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan telaah dimaksud maka penulis merumuskan judul penelitian “ EFEKTIVITAS APLIKASI e-PLANNING DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah efektivitas *e-planning* ini, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Apakah efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan harapan Bappeda yang dibuktikan dengan hasil pengukuran?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat diukur sebagai penghambat efektivitas aplikasi *e-planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik?

1.3 Rumusan Hipotesis

Hipotesis (hipotesa) merupakan dugaan sementara yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran bahwa menggunakan aplikasi *eplanning* dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik akan lebih efektif atau tidak maka perlu di uji kebenarannya. Rumusan hipotesis yang dapat peneliti rumuskan yaitu :

$H_0 : \beta_1\beta_2\beta_3\beta_4 = 0$: tidak terdapat pengaruh antara Efektivitas (X1), kualitas (X2), kuantitas (X3), dan waktu (X4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) dan Penyusunan RKPD (Y2)

$H_a : \beta_1\beta_2\beta_3\beta_4 \neq 0$: terdapat pengaruh antara Efektivitas (X1), kualitas (X2), kuantitas (X3), dan waktu (X4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) dan Penyusunan RKPD (Y2)

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum bertujuan untuk menjelaskan tentang efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik dan memberikan rekomendasi model penerapan aplikasi *e-Planning* dalam mengukur tingkat efektivitas aplikasi, sebagai tujuan penelitian antara lain :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan RKPD;

- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari sisi kualitas, kuantitas dan waktu sehingga pemerintah daerah dapat menentukan dan menetapkan peraturan.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas aplikasi *e-planning*.

1.5 Manfaat Penelitian ¹⁰³

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan dan dunia pendidikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori-teori sebagai upaya peningkatan pengetahuan akademis dan bidang ¹¹ manajemen sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ⁶² diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori, efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu terhadap kinerja Pemerintah Daerah, serta faktor-faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhinya.

2. Bagi Pemerintah

- a. Menjadi pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah secara efektif dan efisien dengan membandingkan variabel

efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu yang di butuhkan dalam penyusunan RKPD tersebut.

- b. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan akan lebih cepat di bandingkan secara manual yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu bisa selesai dalam waktu relative singkat.
- c. Sebagai acuan menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD.
- d. Sebagai panduan bagi BAPPEDA dalam membuat batasan pagu indikatif.
- e. Sebagai acuan penetapan dalam menampung Pokok-pokok Pikiran anggota DPRD Kabupaten Gresik sebagai bahan usulan dalam penyusunan RKPD.

98 3. Bagi Almamater / Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun lima tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun duapuluh tahunan.

1.6 Batasan / Definisi Istilah

Agar mendapatkan satu pemahaman/persepsi, maka dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini, yang tentunya merupakan pendapat dari para ahli atau pakar yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

91 Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

- 19 1. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Pendapat H. Emerson dikutip oleh (Handyaningrat, 1994: 16)
- 17 2. *E Planning* adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai alat penyusun RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD perubahan Kabupaten agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat. (Kemetrian Dalam Negeri, 2010)
- 16 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk 71 menjamin keterkaitan dan konsistensi antara : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini

Seperti yang dikemukakan oleh Andani (2019) dalam jurnal Diah Andani menyatakan bahwa Prinsip ¹² Perencanaan yang Ideal, menurut Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff dalam buku Kartasasmita (1993) “*Administrasi Pembangunan*”. Prinsip Perencanaan Ideal ada 3 (tiga) yaitu Partisipatif (perencanaan harus memiliki nilai manfaat), Berkesinambungan (perencanaan tidak berhenti pada satu tahap saja), Holistik (Perencanaan harus dilihat dari beberapa sektor tidak bisa hanya satu sisi pandang saja).

Menurut Geyer dalam Jurnal Juniawan (2019), menyatakan mengadopsi sistem perencanaan terintegrasi bahwa perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *e-Planning*. ¹⁰ *E-Planning* berperan pada fase Persiapan yaitu pengumpulan data dan informasi pembangunan, fase Strategi yaitu tahap memasukkan usulan pembangunan dan ¹⁰ verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, fase Integrasi yaitu mengintegrasikan visi misi, tujuan, sasaran sampai pada program daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Balqi Fahmi Sani dkk (2017) dalam Jurnal yang berjudul “Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis e Planning”. Bahwa *e-Planning* merupakan sarana

perencanaan secara elektronik yang mampu ⁴¹ merumuskan strategi kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis *e-planning* dengan menggunakan analisis SWOT dapat teridentifikasi faktor internal dan external yaitu : lima faktor ⁴¹ kekuatan, delapan faktor kelemahan, empat faktor peluang, dan tiga faktor ancaman.

Menurut Harry Patrick Paat (2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa perencanaan, pengelolaan pembangunan daerah yang baik dan efektif dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Tabel 2.1
Relevansi Antara Hasil Penelitian Andani Tahun 2019 dan Balqi Fahmi Sani, dkk 2017
dengan Rencana Penelitian

Uraian	Hasil Penelitian Andani Tahun 2019 (Judul Penelitian)	Hasil Penelitian Balqi Fahmi Sani, dkk Tahun 2017 (Judul Penelitian)	Rencana Penelitian 2020 (Judul Penelitian)	Persamaan	Perbedaan	Temuan Peneliti/ Novelty (sesuatu yg baru)
Judul Penelitian	Perencanaan Pembangunan berbasis <i>e-Planning</i> di Kabupaten Subang	Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis <i>e Planning</i>	Efektivitas Aplikasi <i>e-planning</i> dalam Proses Penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik	Penelitian tentang Penerapan <i>E-planning</i> Pendekatan Kuantitatif Membahas Masalah Perencanaan yang terintegrasi dengan <i>eplanning</i>	Tidak Meneliti tentang Efektivitas Proses Penyusunan RKPD yang efektif dan efisien dengan pengukuran variabel Kualitas, Kuantitas dan Waktu Lokasi Penelitian	Andani : Prinsip Perencanaan : Partisipatif, berkesinambungan dan Holistik Balqi Fahmi : Menguji aplikasi dg SWOT Peneliti : Mengukur Efektivitas dari (Kualitas, Kuantitas, dan Waktu)
Variabel Bebas (X)	Prinsip Perencanaan Pembangunan yang Ideal	Tingkat kesiapan Pemerintah Kota Bogor	Efektivitas penerapan Aplikasi <i>e-planning</i>	10 Aplikasi <i>e-planning</i> dalam perencanaan pembangunan	Hanya bahas perencanaan yg efektif (Andani). Penyapan skill/SDM, sarana prasarana, jaring, dll Efektivitas dari waktu, kemudahan akses, penganggaran (Cost).	Perencanaan Pembangunan yang berkualitas. Evaluasi kelebihan dan kekurangan aplikasi <i>eplanning</i> sebagai bahan perbaikan
Variabel Terikat (Y)	Berbasis <i>e-planning</i>	Perencanaan Berbasis <i>e-planning</i>	Proses Penyusunan RKPD 2021	Membahas masalah <i>eplanning</i> dalam proses penyusunan RKPD 2021	Efektivitas Penyusunan RKPD	Menggantikan <i>eplanning</i> dengan aplikasi yang lebih baik dari <i>eplanning</i>
Lokasi Penelitian	Kabupaten Subang	Pemerintah Kota Bogor	Bappeda Kabupaten Gresik			

Tabel 2.2
Relevansi Antara Hasil Penelitian Juniawan Tahun 2019 dan Harry Paatrik Paat, dkk 2018
dengan Rencana Penelitian

Uraian	Hasil Penelitian Juniawan Tahun 2019 (Judul Penelitian)	Hasil Penelitian Harry Paatrik Paat, dkk Tahun 2018 (Judul Penelitian)	Rencana Penelitian 2020 (Judul Penelitian)	Persamaan	Perbedaan	Temuan Peneliti/ Novelty (sesuatu yg baru)
Judul Penelitian	Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning	59 Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara	Efektivitas Aplikasi e-planning dalam Proses Penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik	E-planning Aplikasi yang mampu mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Membahas Masalah Perencanaan Pembangunan	Tidak Meneliti tentang Efektivitas Penyusunan RKPD yang berkualitas Lokasi Penelitian	Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan
Variabel Bebas (X)	Perencanaan dibagi dalam fase, yaitu fase persiapan, Strategis, dan Integrasi	Perencanaan berbasis E-planning	Efektivitas 100% nera pan Aplikasi e-planning	Aplikasi e-planning dalam perencanaan pembangunan akan terintegrasi dengan E-budgeting, E-musrenbang dan sebagainya.	Penyiapan skill/ SDM, sarana prasarana, jaringan, dll Efektivitas dari waktu, kemudahan akses, penganggaran(Cost)	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas
Variabel Terikat (Y)	Berbasis e-planning	Perencanaan Berbasis e-planning	Penyusunan RKPD 2021	Sama-sama membahas masalah e-planning dalam proses penyusunan RKPD 2021	Efektivitas diukur dari kualitas, kuantitas dan Waktu	
Lokasi Penelitian	Bappeda Kabupaten Gresik					

2.2 Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan peneliti dalam menjelaskan dan membahas permasalahan yang di hadapi yaitu :

1. Keterbatasan peneliti dalam menganalisis masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu Kualitas, Kuantitas dan Waktu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Pertanyaan di dalam kuesioner yang didistribusikan kepada responden kurang menyempit atau fokus sehingga jawaban yang diberikan oleh sampel kurang mewakili permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Konsep Efektivitas

Konsep tentang efektivitas secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau program ketepatangunaan dalam pencapaian tujuan dapat diukur dari sisi hemat waktu, hemat pembiayaan dan lebih mudah dilakukan. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005: 92).

Menurut Martoyo (2002: 4) efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana

atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Pendapat para ahli tentang ¹⁴efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

²³Richard M Steers (1985: 208–209) menyatakan bahwa efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu :

1. Model optimasi tujuan, bahwa setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda dan indikator tingkat keberhasilan yang berbeda, sehingga ¹⁰⁴nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
2. Perspektif sistem, dengan memperhatikan korelasi antara komponen-komponen intern maupun ektern yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam hubungan lingkungan sosial organisasi.
3. ¹⁷Efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara tujuan yang diinginkan organisasi, jika tujuan relatif homogen, maka kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar. Dari pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya (aplikasi *eplanning*).

2.3.2 Teori Perencanaan (*Planning*)

Konsep Perencanaan menurut Terry (2006: 342) ³⁵ adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Pendapat Arsyad (1999: 103), menyatakan ⁴⁰ ada 4 (empat) elemen dasar perencanaan yaitu :

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4. Perencanaan untuk masa depan.

Pada konteks pembangunan, menurut Sjafrizal (2008: 217) ³⁵ secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

2.3.3 Definisi *E-planning*

E-planning adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat. (Pemerintah Kota Jambi, 2017).

2.3.4 Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (Putri, 2019).

Kedudukan RKPD dalam perencanaan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :
(Bappeda Tanjung Balai, 2020)

- a) Secara substansial menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah dalam menentukan pagu indikatif Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan;
- b) Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintahan Kabupaten Gresik serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- c) Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

- 20
- d) Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.5 Penerapan Aplikasi *E-planning*

Pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kabupaten Gresik adalah implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, tetapi server yang masih sering error dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pemograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik. Namun dengan semua masalah yang dihadapi upaya pemerintah Kabupaten Gresik sejauh ini dinilai sudah cukup tanggap dalam menyelesaikan masalah dalam penerapan *E-Planning* dapat dilihat dari 3 aspek diantaranya Aspek Teknologi, ketika terjadi error pada server, tanggapan pemerintah Kabupaten Gresik cukup cepat hanya beberapa saat sudah ditangani dan responnya cepat. Kemudian pada aspek birokrasi atau teknis, Ketika input dilakukan dalam satu lingkup di Bappeda, Pemerintah Kabupaten Gresik menambah kapasitas jaringan internet pada waktu tertentu sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya error saat input.

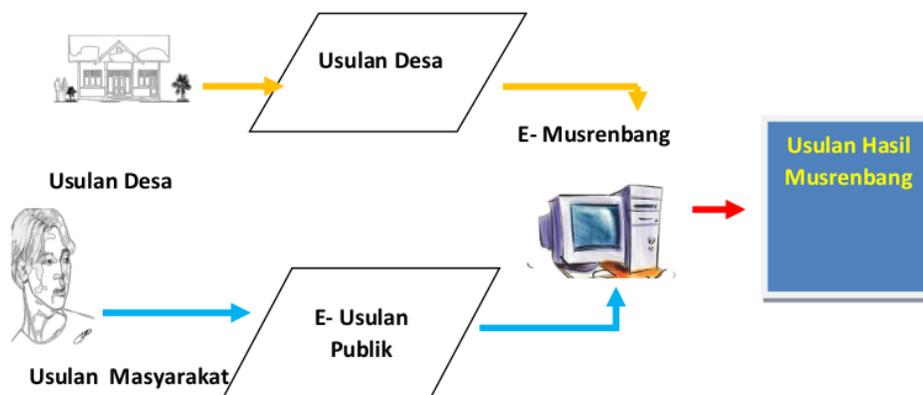
Kemudian ketika terjadi masalah yang mendesak tetapi pemerintah Kabupaten Gresik tidak dapat menanganinya sendiri maka Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan koordinasi dengan PT. Usadi (Konsultan *E-planning*) untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi.

2.3.6 Aplikasi *E-Planning* dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

E-Planning adalah aplikasi yang menginovasi proses musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pokok-pokok pikiran dewan, musrenbang Kabupaten/Kota, hingga terbentuk rancangan RKPD yang lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi *E-Planning* memfasilitasi Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja perencanaan pembangunan secara efektif, efisien dan terintegrasi serta menjadi alat bantu Bappeda dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sebagaimana gambar 2.2.4.1. berikut ini :

Gambar 2.2.4.1.

Alur Kerja Usulan Desa dan Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang

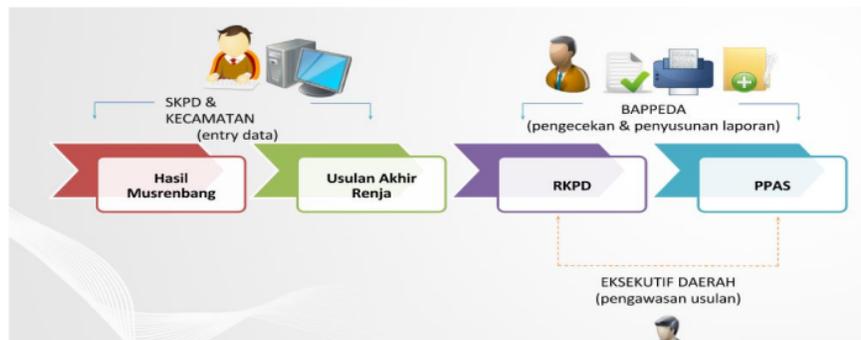


Sumber : Data E-planning Bappeda yang diolah

Setelah sampai pada usulan hasil Musrenbang maka tahap selanjutnya yaitu masuk kepada tahap Forum SKPD atau Kecamatan yaitu tahap pengentryan usulan akhir Renja yang di pandu dan controlling oleh Bappeda sebagai proses RKPD dan PPAS yang akan dibahas oleh tim anggaran eksekutif daerah, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam alur bagan RKPD pada gambar 2.2.4.2 di bawah ini :

Gambar 2.2.4.2.

Alur Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Sumber : <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/>

Dengan adanya aplikasi yang menawarkan berbagai kemudahan dalam penerapannya juga memiliki berbagai kelebihan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga kerja para eksekutif lebih ringan dan relatif cepat, beberapa kelebihan dari aplikasi *eplanning* yaitu : (Integra, n.d.)

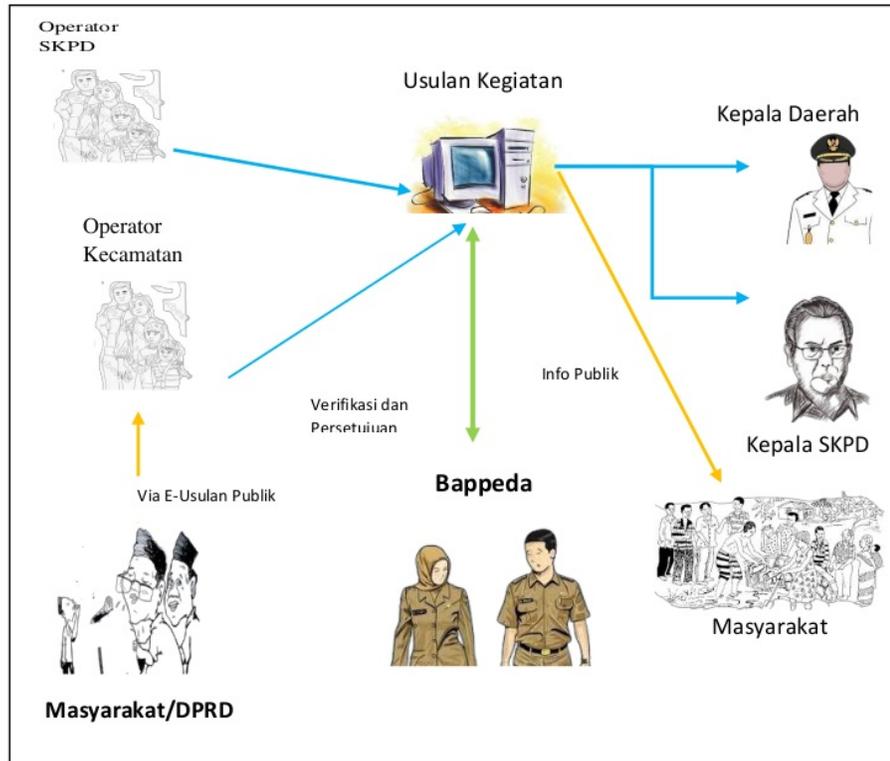
- 1) Penyusunan dapat dilakukan secara on line.

- 2) Data terintegrasi, (Sistem Anggaran, Sistem Evaluasi dan Monitoring, dan lain-lain).
- 3) Pengaturan Waktu pertahapan di paparkan secara jelas, sehingga Penyusunan RKPD lebih efisien (tepat waktu).
- 4) Pengawasan Penyerapan Anggaran lebih mudah di pantau dalam setiap triwulan sebagai bahan evaluasi setiap triwulan.
- 5) Lebih praktis dan sederhana (satu login untuk beberapa sistem).
- 6) Lebih efektif dan efisien.

Data *e planning* dapat terhubung dengan aplikasi yang lain antara lain (Integra, n.d.) : E-SIMRENDAN, E-TEPPA, E-SISMON, E-RPJMD, E-SAKIP, dan E-DALEV. Dari aplikasi-aplikasi diatas di Kabupaten Gresik belum dapat semua terintegrasi dengan aplikasi *eplanning*, tetapi aplikasi *eplanning* sudah mampu membuat beberapa pekerjaan terkait dengan perencanaan menjadi semakin mudah. Lebih jelas dapat diperhatikan gambar 2.2.4.3 dibawah ini :

Gambar 2.2.4.3.

Pengguna Aplikasi E-planning di Kabupaten Gresik



Sumber : <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/> yang diolah

2.3.7. Pengaturan Indikator Kinerja dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dengan E-Planning

Indikator kinerja perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). (Kementrian Dalam Negeri, 2017: Pasal 1).

Penetapan indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Penetapan indikator kinerja dilaksanakan pada tingkatan sasaran dan sasaran pokok.

Penetapan indikator kinerja selain pada tingkatan sasaran dan sasaran pokok diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Penilaian terhadap indikator kinerja program dan kegiatan juga dijelaskan dalam evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Provinsi.

Perumusan indikator kinerja dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan untuk ¹⁸ memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam evaluasi RPJPD sebagaimana dituangkan dalam Lampiran B tabel T-B.2. pengukuran indikator kinerja dilakukan terhadap sasaran pokok atau telah sesuai dengan kaidah perumusan indikator kinerja sasaran pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 169.

Pada evaluasi RPJMD sebagaimana dituangkan dalam Lampiran B Tabel T-B.3, pengukuran indikator kinerja dilaksanakan terhadap Tujuan, Sasaran, dan Program. Hal ini menghasilkan fakta disharmonisasi antara batang tubuh dan lampiran bahwa penetapan indikator kinerja di tingkat tujuan RPJMD maupun program RPJMD yang tidak dijelaskan dalam batang tubuh namun disebutkan dalam lampiran sehingga mengindikasikan bahwa tingkatan tujuan dan program RPJMD harus dilengkapi dengan indikator. Adapun penetapan indikator pada sasaran RPJMD telah selaras dengan kaidah perumusan Sasaran RPJMD. Pada lingkup program, evaluasi

terhadap indikator kinerja pada program memberikan informasi bahwa setiap program dalam RPJMD harus diukur dengan indikator program meskipun pada batang tubuh tidak disebutkan. Lebih lanjut, pada evaluasi RKPD sebagaimana dimuat dalam tabel T-B.4., pengukuran indikator kinerja dilaksanakan pada tingkatan program dengan kriteria *outcome* dan kegiatan dengan kriteria *output*. Mekanisme penetapan indikator berbasis *outcome* dan *output* sebelumnya juga tidak disebutkan dalam dalam batang tubuh Permendagri 86 Tahun 2017.

Berlandaskan telaah di atas maka secara substansial penetapan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Penetapan indikator kinerja selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 174 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017. Dalam keseluruhan batang tubuh aturan, daftar indikator kinerja ¹³⁵ pembangunan daerah sebagaimana dimaksud hanya disebutkan dalam Pasal tersebut sehingga tidak bisa dijelaskan apakah daftar tersebut adalah daftar indikator sasaran dan sasaran pokok ¹³⁵ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 atau penetapan indikator selain dalam perumusan sasaran dan sasaran pokok, perumusan indikator kinerja justru disebut dengan nomenklatur “Indikator Kinerja Kunci” meliputi:

- a. Aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing.
- b. Aspek Pelayanan Umum yang dibagi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja dalam Permendagri 86 Tahun 2017 menjadi bagian dalam ¹⁸ penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dan dokumen rencana perangkat Daerah yang dibedakan dalam tingkatan tujuan, sasaran pokok, sasaran, program, sampai dengan kegiatan. Tetapi, di dalam regulasi ini belum dijelaskan hierarki penetapan indikator kinerja dalam setiap tingkatan atau arsitektur perencanaan pembangunan sehingga tidak ditemukan hubungan atau tingkatan indikator sasaran pokok di dalam RPJP dan Indikator tujuan dan sasaran di dalam RPJMD atau hubungan dan tingkatan indikator program di dalam RPJMD, RKPD, Renstra, maupun Renja OPD.

Dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah dibedakan menjadi 6 (enam) tingkatan yang bermakna bahwa tingkat tertinggi dijabarkan atau dimuat oleh indikator kinerja di bawahnya dengan kriteria *impac* atau *benefit* menuju *outcome* dan terakhir *output*. Pertama, Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan indikator dengan tingkat hierarki tertinggi karena dokumen RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah jangka panjang yang diacu oleh dokumen perencanaan lainnya. Kedua adalah ⁹⁹ indikator kinerja tujuan.

Ketiga, Indikator kinerja sasaran RPJMD, indikator kinerja tujuan Renstra dan Tujuan Renja OPD. Hubungan Sasaran RPJMD dan Sasaran Pokok RPJMD dimuat dalam Pasal 167 ayat (7) dan Pasal 168 ayat (3). Dengan demikian, indikator kinerja sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari indikator kinerja sasaran pokok dan/atau memuat indikator kinerja

sasaran pokok dalam masa periode jangka menengah berkenaan. Hubungan Indikator kinerja sasaran dapan tujuan dapat dijelaskan dalam rumusan dari Sasaran dalam Pasal 1 nomor 50. Indikator kinerja sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari indikator kinerja tujuan dan/atau memuat indikator kinerja tujuan dalam periode yang sama.

Penetapan indikator kinerja tujuan renstra dalam batang tubuh Permendagri 86 Tahun 2017 tidak diatur namun dalam Lampiran C, tetapi disebutkan bahwa pada Bab IV dokumen Renstra OPD harus dirumuskan tujuan dan sasar beserta indikator kerjanya. Mengingat Renstra adalah penjabaran RPJMD maka indikator tujuan renstra harus mempedomani indikator tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Mengingat sasaran RPJMD telah merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD maka indikator kinerja tujuan Resntra OPD merupakan penjabaran dari indikator kinerja sasaran RPJMD dan/atau memuat indikator kinerja sasaran RPJMD dalam periode yang sama sedangkan indikator kinerja tujuan Renja OPD merupakan penjabaran dari indikator kinerja sasaran RPJMD dan/atau memuat indikator kinerja sasaran RPJMD dalam periode yang sama pada tahun perencanaan berkenaan.

Keempat, Indikator Kinerja Sasaran Renstra dan Sasaran Renja OPD. Hubungan Indikator Sasaran RPJMD dan Saaran Renstra Perangkat daerah dijelaskan dalam Pasal 168 ayat (4), maka sasaran renstra OPD adalah penjabaran darit tujuan renstra OPD. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran renstra OPD adalah penjabaran dari indikator kinerja tujuan renstra OPD/sasaran RPJMD dan/atau memuat indikator kinerja tujuan renstra

OPD/sasaran RPJMD dalam periode yang sama. Adapun indikator kinerja sasaran renja OPD berlaku hal yang sama yaitu mengacu pada tujuan Renja OPD dalam periode yang sama pada tahun perencanaan berkenaan.

Kelima, Indikator Kinerja Program RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Program yang tercantum dalam RPJMD secara jangka menengah identik dengan Program yang dimuat dalam Renstra dalam periode yang sama sebagaimana dijabarkan dalam tata cara penyusunan RPJMD dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 41-72 serta dalam tata cara penyusunan Renstra OPD yang dijelaskan dalam Pasal 108-124. Program jangka menengah kemudian dijabarkan dalam dokumen RKPD dan Renja OPD sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan RKPD dalam Pasal 73-107 serta tata cara penyusunan Renja OPD dalam Pasal 125-143 dimana program tahunan identik dengan program jangka menengah dengan pencapaian target yang disesuaikan disebabkan oleh berbagai kondisi semisal perkembangan kapasitas fiskal daerah, perubahan kebijakan nasional, atau keadaan force major yang menyebabkan suatu program tidak dapat diakomodasi. Dengan demikian, maka indikator kinerja program pada Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD adalah sama.

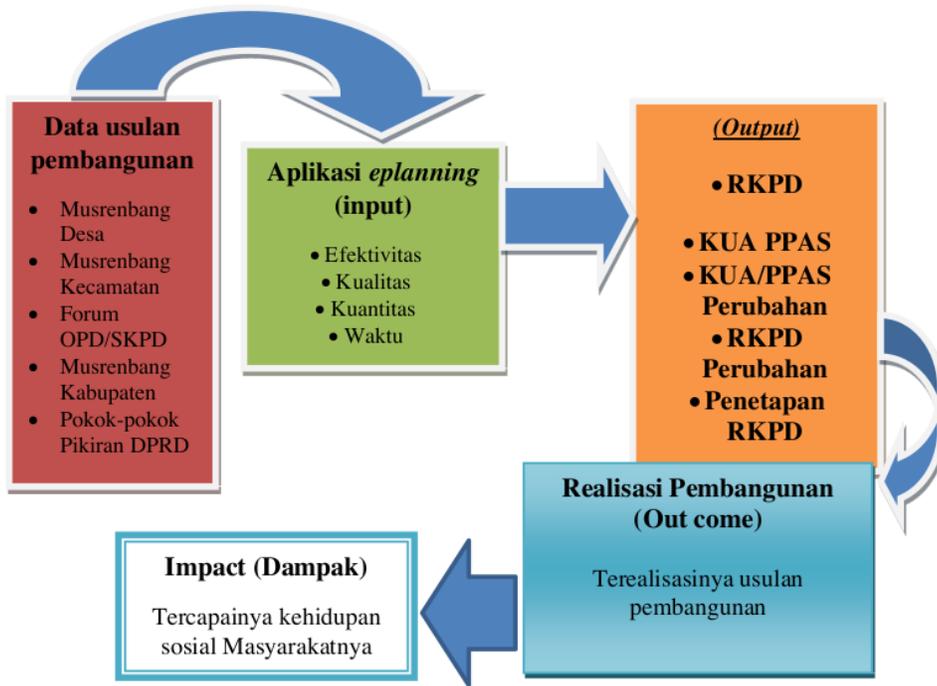
Keenam, tingkatan terakhir adalah indikator kinerja kegiatan yang dimuat dalam RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. ⁸⁶ Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka

mencapai hasil (*outcome*) suatu program maka tingkat indikator kinerja adalah penjabaran dari indikator kinerja program dengan kriteria *output*.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010: 176) Efektivitas adalah ⁵ suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran (*output*). Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas. Sedangkan Aplikasi *e-planning* adalah suatu aplikasi yang membantu/memudahkan kinerja BAPPEDA dalam ⁶⁶ rangka penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat.

E-planning diindikasikan memberikan pengaruh dan berkorelasi dengan efektivitas kerja dari sisi waktu, harga (biaya), nilai sosial budaya dan tingkat ketelitiannya. Oleh sebab itu efektivitas aplikasi *e-planning* dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerapan aplikasi *e-planning* dalam setiap tahapan penyusunan RKPD merupakan alat perencanaan, pengendalian, monev, kebijakan anggaran, politik, penilaian kinerja, motivasi, dan membuat laporan. Berikut ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini agar dapat di pahami gambaran permasalahan secara singkat seperti pada alur di bawah ini :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti dalam mendeskripsikan permasalahan penelitian dan menjawab atau pemaparan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan serangkaian observasi atau pengukuran yang dinyatakan dalam angka.

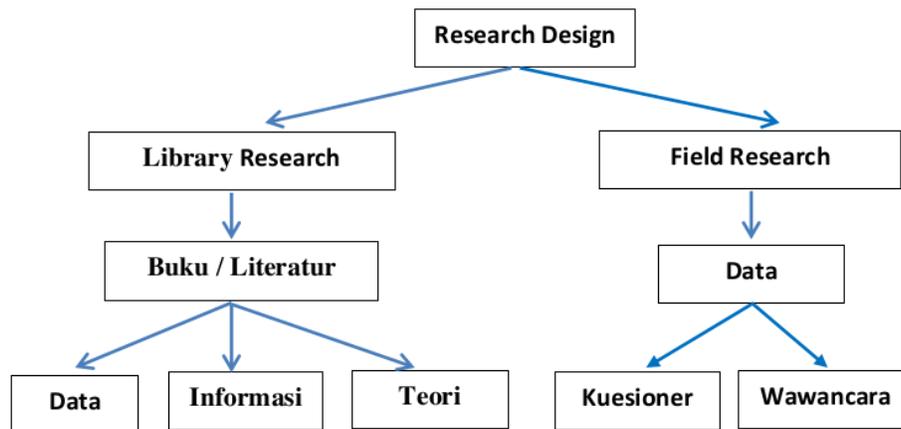
3.1 Jenis Penelitian (Desain Penelitian)

Berdasarkan latar belakang dan karakteristik masalah pada penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai *explanatory research*, dimana penelitian explanatory adalah penelitian memiliki orientasi untuk menguraikan berbagai kejadian dan fenomena penelitian (Abdul Rahman, 2016: 73). Pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok yang berasaskan pada filsafat positivisme.

⁵ Dalam *field research*, penulis mengumpulkan data melalui kuesioner dan wawancara secara mendalam yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian (Silalahi, 2009: 180). Lebih jelas ⁶² dapat dilihat pada Bagan 3.1.1 di bawah ini :

Bagan 3.1.1.

Bagan Desain Penelitian



Sumber : Silalahi, 2009 yang di olah.

128
3.2 Objek Penelitian

Peneliti mengambil objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Gresik, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aplikasi *e-planning* (sistem informasi perencanaan) yang akan diobservasi dan melakukan pengukuran dengan menggunakan teknik pengukuran. Pengukuran merupakan bagian integral penting dalam penelitian kuantitatif untuk menguji aplikasi *e-planning* dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik. (Silalahi, 2009: 189).

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gresik tepatnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan (BAPPEDA) untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-planning* yang selama ini sudah di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan variabel independen, yaitu terhadap variabel dependen, yaitu Efektivitas aplikasi *e-planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Waktu penelitian ini di rencanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi pada sebuah proses analisis data serta penarikan kesimpulan dari suatu penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan data jangan sampai terjadi kesalahan, karena dapat membuat kesalahan pada bagian analisis data dan juga kesimpulan.

Menurut Riduwan (2010: 51) teknik pengumpulan data adalah Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011: 103) teknik pengumpulan data adalah Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data antara lain :

3.4.1 Kuesioner (*questionnaires*)

Menurut Sugiyono (2016: 199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Pegawai Bappeda dan Sub Bagian Program di OPD), kuesioner didistribusikan langsung kepada pegawai Bappeda Kabupaten Gresik sebagai pengelola Aplikasi e Planning, dan kepada Sub Bagian Program OPD.

⁵ Pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban. Menurut Sugiyono (2017: 93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang disebut sebagai variabel penelitian.

¹⁹
Tabel 3.1
Pengukuran Terhadap Variabel Independen

No.	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu-Ragu (RR)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiono (2013)

⁵⁸ 3.4.2 Wawancara

Menurut Riyanto (2012: 82) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden.

Berdasarkan ⁵⁶ pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide dalam

suatu topik tertentu melalui tanya jawab kepada informan atau responden/subyek.

3.4.3 Observasi

Menurut Sugiyono (2016: 145) ⁶⁴ observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.

Jadi observasi adalah suatu cara teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis sebagai upaya untuk pengumpulan data yang kompleks dan natural tanpa ada manipulasi data yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis secara wajar dalam interaksi. Tujuan melakukan observasi sebagai metode penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas aplikasi *e-planning*. Sebagaimana yang nampak pada contoh lembar pengamatan untuk menguji tingkat efektivitas aplikasi *e-planning* ³ dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Contoh Lembar Pengamatan untuk Mengukur Efektivitas Aplikasi
***Eplanning* dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

No.	Aspek Yang Diamati (Variabel)	SKOR			Keterangan
		1	2	3	
1.	Kuantitas :				
	1.1. Banyak			√	
	1.2. Sedang				
	1.3. Sedikit				
2.	Kualitas :				
	2.1. Bagus		√		
	2.2. Sedang				
	2.3. Jelek				
3.	Waktu :				
	3.1. Cepat				
	3.2. Sedang		√		
	3.3. Lama				

3.4.4 Studi Dokumentasi

⁷⁰ Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2015: 329)

3.4.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah ²⁴ suatu karakteristik, sifat, ciri, atribut yang memiliki keragaman nilai atau keadaan yang melekat seseorang atau subyek yang memiliki nilai (Abdul Rahman, 2016: 109). ⁴⁵ Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu :

1. Variabel bebas (independen variable)
2. Variabel penghubung (intervening variable)
3. Variabel dependen (dependen variable)

³⁷ 3.4.6 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel

Dalam penelitian ini akan menguraikan indikator empiris yaitu efektivitas, kuantitas, kualitas, waktu, ¹¹¹ aplikasi *e planning* dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Variabel Definisi Operasional Indikator dapat dihitung terlebih dahulu range skor efektivitas adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Keterangan :

Skor tertinggi : 90

Skor terendah : 30

Kategori : 6

Jadi :

$$\text{Efektivitas} = \frac{90 - 30}{6} = \frac{60}{6} = 10$$

Jadi range skor efektivitas adalah 10 , maka di katakan efektivitas rendah jika skor angka 30 s.d 50, dikatakan efektivitas Sedang jika skor angka 50 s.d 70, dan dikatakan efektivitas tinggi jika skor angka 70 s.d 90.

⁸ 3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017: ¹⁹ 80) populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah Bappeda Kabupaten Gresik.

Tabel 3.3
Populasi Pada Bappeda Organisasi Perangkat Daerah

No	Nama Instansi	Populasi
1.	Pegawai Bappeda	37 Orang
2.	Organisasi Perangkat Daerah	28 Orang
	Jumlah	65 Orang

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

⁷ Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka seluruh populasi diteliti. Teknik samplingnya adalah total sampling yang ada yaitu 65 orang.

Sehingga semua populasi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan penelitian ini.

3.5.2 Sampel

⁵ Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 118).

Teknik dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 82) ³ *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah).

³ Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling, karena anggota populasi 65 orang staf pada Bappeda dan Kasub Bagian Program OPD ³ memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Cara ³ penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

³ Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e² = Taraf nyata atau batas kesalahan

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 65 orang, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Maka : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{65}{1 + (65 \times (0,05)^2)}$$

$$n = \frac{65}{1 + (65 \times 0,0025)}$$

$$n = \frac{65}{1 + 0,1625}$$

$$n = \frac{65}{1,163}$$

$$n = 55,89 \text{ di bulatkan menjadi } 56 \text{ responden}$$

Sampel dari populasi berjumlah 65 orang dengan tarif kesalahan 5%, maka sampel 56 responden. Untuk penyebaran sampel di Bappeda dan OPD

Kabupaten Gresik sebagai berikut :

$$\text{Penyebaran Sampel} = \frac{\text{Bappeda/OPD}}{\text{Jumlah Populasi}} \times \text{Sampel}$$

$$1. \text{ Bappeda Gresik} = \frac{37}{65} \times 56 = 31,87 \text{ dibulatkan menjadi 32 sampel}$$

$$2. \text{ Organisasi PD Kab. Gresik} = \frac{28}{65} \times 56 = 24,12 \text{ dibulatkan menjadi 24 sampel}$$

3.6 Teknik Analisis Data

Proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan (Silalahi, 2009: 332). Data kuantitatif menurut Silalahi (2009: 282) adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang nilainya dapat dinyatakan secara kuantitatif atau angka. Sebagaimana nampak pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Rekapitulasi dari Hasil Pengumpulan Kuesioner pada Karyawan Bappeda Kabupaten Gresik

No. Responden	Kuantitas	Kualitas	Waktu	Efektif
1.	3	2	2	7
2.	2	2	2	6
3.	1	2	2	5
4.	3	3	3	9
5.	3	1	3	7

6.	3	2	3	8
7.	2	3	2	7
8.	1	2	2	5
9.	3	3	1	7
10.	2	3	3	8
11.	3	3	3	9
12.	2	2	2	6
13.	2	3	2	7
14.	1	3	2	6
15.	3	2	2	7
16.	2	3	3	8
17.	3	2	3	8
18.	2	2	2	6
19.	3	3	2	8
20.	2	2	2	6
21.	1	3	3	7
22.	3	3	2	8
23.	2	2	3	7
24.	1	2	3	6
25.	2	3	1	6
26.	2	2	3	7
27.	2	3	3	8
28.	3	2	2	7
29.	2	2	2	6
30.	3	3	2	8
31.	1	3	3	7
32.	3	2	2	7
Jumlah	1 = 8 2 = 14 3 = 15	1 = 1 2 = 18 3 = 18	1 = 3 2 = 19 3 = 15	254

Sumber : Dari Hasil Responden dengan menggunakan kuesioner yang diolah

Tabel 3.4
Rekapitulasi dari Hasil Pengumpulan Kuesioner pada Kasub Bagian
Program dan Pelaporan Kabupaten Gresik

No. Responden	Kuantitas	Kualitas	Waktu	Efektif
1.	3	2	2	7
2.	2	2	2	6
3.	1	2	2	5
4.	3	3	3	9
5.	3	1	3	7
6.	3	2	3	8

7.	2	3	2	7
8.	1	2	2	5
9.	3	3	1	7
10.	2	3	3	8
11.	3	3	3	9
12.	2	2	2	6
13.	2	3	2	7
14.	1	3	2	6
15.	3	2	2	7
16.	2	3	3	8
17.	3	2	3	8
18.	2	2	2	6
19.	3	3	2	8
20.	2	2	2	6
21.	1	3	3	7
22.	3	3	2	8
23.	2	2	3	7
24.	1	2	3	6
Jumlah	1 = 5 2 = 11 3 = 12	1 = 1 2 = 15 3 = 12	1 = 1 2 = 11 3 = 16	125

Sumber : Dari Hasil Responden dengan menggunakan kuesioner yang diolah

Dari dua tabel diatas maka dapat di jabarkan masing-masing variabel sehingga dapat disajikan data-data yang akan dibutuhkan, sebagaimana Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Kuantitas dari responden pegawai Bappeda dan OPD

	Kuantitas Pegawai Bappeda	%	Kuantitas OPD	%
Banyak (3)	15	40,5	14	50
Sedang (2)	14	37,8	9	32
Sedikit (1)	8	21,7	5	18
	37	100	28	100

Sumber : Dari Hasil Responden dengan menggunakan kuesioner yang diolah

Dari tabel 3.5 di dapat kesimpulan bahwa :

1. Dikatakan efektif tinggi secara kuantitas jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya ≥ 15 dan ≤ 14 atau $40,5\% \geq 50\%$.
2. Dikatakan efektif sedang secara kuantitas jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya = 14 atau $37,8\% \leq 32\%$.
3. Dikatakan efektif rendah secara kuantitas jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya 8 atau $21,7\% \leq 18\%$.

Tabel 3.6
Kualitas dari responden pegawai Bappeda dan OPD

	Kualitas Pegawai Bappeda	%	Kualitas OPD	%
Bagus (3)	17	45	14	50
Sedang (2)	18	50	13	46,5
Jelek (1)	2	5	1	3,5
	37	100	28	100

Sumber : Dari Hasil Responden dengan menggunakan kuesioner yang diolah

Dari tabel 3.6 di dapat kesimpulan bahwa :

1. Dikatakan efektif tinggi/bagus secara kualitas jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya ≥ 17 dan ≤ 14 atau $45\% \geq 50\%$.
2. Dikatakan efektif sedang secara kualitas jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya ≥ 18 dan ≤ 13 atau $50\% \leq 46,5\%$.
3. Dikatakan efektif rendah secara kualitas jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya = 2 atau $5\% \leq 1$ atau $3,5\%$.

Tabel 3.7
Ketepatan Waktu dari responden pegawai Bappeda dan OPD

	Ketepatan Waktu Pegawai Bappeda	%	Ketepatan Waktu OPD	%
Cepat (3)	15	40,5	12	42,8
Sedang (2)	18	48,6	14	50
Lama (1)	4	10,9	2	7,2
	37	100	28	100

Sumber : Dari Hasil Responden dengan menggunakan kuesioner yang diolah

Dari tabel 3.7 di dapat kesimpulan bahwa :

1. Dikatakan efektif tinggi/cepat secara waktu jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya $15 \geq 12$ atau $40,5\% \geq 42,8\%$.
2. Dikatakan efektif sedang secara waktu jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya $18 \geq 14$ atau $= 50\%$.
3. Dikatakan efektif rendah secara waktu jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya $4 \leq 2$ atau $10,9\% \leq 7,2\%$.

Tabel 3.8
Efektivitas dari responden pegawai Bappeda dan OPD

	Kuantitas Pegawai Bappeda	%	Kuantitas OPD	%
Efektivitas Tinggi (3)	12	32,4	12	42,8
Efektivitas Sedang (2)	21	56,7	13	46,4
Tidak efektif / Rendah (1)	4	10,9	3	10,7
	37	100	28	100

Sumber : Dari Hasil Responden dengan menggunakan kuesioner yang diolah

Dari tabel 3.8 di dapat kesimpulan bahwa :

1. Dikatakan efektif tinggi jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya $12 \geq 12$ atau $32,4\% \geq 42,8\%$.

2. Dikatakan efektif sedang jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya = 21 atau $58,3\% \leq 55,3\%$.
3. Dikatakan efektif rendah jika responden dari pegawai Bappeda dan OPD menyatakan pendapatnya = 3 atau $8,3\% \leq 7,9\%$.

Jadi asumsi atau pernyataan tentang efektifitas aplikasi *e planning* belum sepenuhnya di katakan sangat efektif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan hasil penelitian kepada responding hasil tertinggi berkisar $58,3\% - 55,3\%$ berarti efektivitas Aplikasi *eplanning* dapat dikatakan cukup efektif dalam membantu Bappeda dalam proses penyusunan RKPD.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono dalam Riduwan (2015: 97) ⁵ Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

³ 3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017: 130). Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian digunakan metode split half item tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item ³ genap.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2017: 210) menyatakan bahwa “ analisis regresi berganda merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk memprediksikan berubahnya nilai variable tertentu bila variable lain berubah”. Jumlah variabel independen yang diteliti lebih dari satu, sehingga dikatakan regresi berganda. Hubungan antara variable tersebut dapat dicirikan melalui model matematika yang disebut dengan model regresi. Model regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variable yang diteliti.

3.6.4 Analisis Korelasi Berganda

³ Analisis korelasi berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X_1 (efektivitas), X_2 (kualitas), X_3 (kuantitas) dan X_4 (waktu) dan Y_1 (aplikasi *e planning*) serta Y_2 (Penyusunan RKPD).

³ 3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan apakah hipotesis yang akan diajukan sebaiknya diterima (signifikan) atau ditolak oleh peneliti. Rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Uji hipotesis simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang dikemukakan dapat dijabarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2017: 192) :

³
 $H_0 : \beta_1\beta_2\beta_3\beta_4 = 0$: tidak terdapat pengaruh antara Efektivitas (X1), kualitas (X2), kuantitas (X3), dan waktu (X4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) dan Penyusunan RKPD (Y2)

⁵⁶
 $H_a : \beta_1\beta_2\beta_3\beta_4 \neq 0$: terdapat pengaruh antara Efektivitas (X1), kualitas (X2), kuantitas (X3), dan waktu (X4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) dan Penyusunan RKPD (Y2).

³ 2. Uji Hipotesis Parsial

Hipotesis parsial diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, apakah hubungan tersebut saling mempengaruhi atau tidak. Hipotesis parsial dijelaskan kedalam bentuk statistik sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$: tidak terdapat pengaruh Efektivitas (X1), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) dalam proses penyusunan RKPD (Y2)

$H_a : \beta_1 \neq 0$: terdapat pengaruh Efektivitas (X1), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) dalam proses penyusunan RKPD (Y2).

$H_0 : \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh kualitas (X2), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) Proses penyusunan RKPD (Y2).

$H_0 : \beta_2 \neq 0$: terdapat pengaruh kualitas (X2), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) dalam proses penyusunan RKPD (Y2).

$H_0 : \beta_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh kuantitas (X3), terhadap Aplikasi *e planning* (Y1) Proses penyusunan RKPD (Y2).

$H_0 : \beta_3 \neq 0$: terdapat pengaruh kuantitas (X_3), terhadap Aplikasi *e planning* (Y_1) dalam proses penyusunan RKPD (Y_2).

$H_0 : \beta_4 = 0$: Tidak terdapat pengaruh waktu (X_4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y_1) Proses penyusunan RKPD (Y_2).

$H_0 : \beta_4 \neq 0$: terdapat pengaruh waktu (X_4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y_1) dalam proses penyusunan RKPD (Y_2)

3.6.6 Analisis Koefisien Determinasi Simultan

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel x (efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu) terhadap variabel Y (aplikasi *e planning*). Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X_1, X_2, X_3, X_4 , (variabel independen) terhadap variabel Y (variabel dependen), biasanya dinyatakan dalam bentuk persen (%).

3.6.7 Analisis Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh secara parsial per sub variable Efektivitas (X_1), Kualitas (X_2), Kuantitas (X_3), waktu (X_4) terhadap Aplikasi *e planning* (Y_1) dalam proses penyusunan RKPD (Y_2),

3.7 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Silalahi (2009: 289) data primer adalah suatu objek atau dokumen original, material mentah dari pelaku yang disebut “*First-hand Information*”. Data yang dikumpulkan dari aktual ketika peristiwa terjadi. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Silalahi (2009: 291) data sekunder adalah data yang di kumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder, sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembebasan tentang materi original.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017: 335) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.8.1. Teknik Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah memenuhi syarat untuk dianalisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, analisis regresi linier sederhana dan uji prasyarat regresi.

3.8.1.1. Uji Normalitas

Untuk menguji normal tidaknya sampel dihitung dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05.

3.8.1.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen.

$$Y = A + BX + e$$

Sumber : (Hidayat Huang)

Keterangan :

Y = adalah variabel dependen atau respon

A = adalah intercept atau konstanta

B = adalah koefisien regresi atau slope

e = adalah residual atau error

3.8.1.3 Uji Prasyarat Regresi

Untuk melihat pengaruh ikatan antar variabel, hingga analisis informasi memakai analisis regresi linier ganda. Saat sebelum informasi tersebut dianalisis dengan regresi linier ganda, wajib diuji linieritas terlebih dulu. Tidak hanya itu, informasi pula wajib terbebas dari anggapan klasik meliputi multikolinieritas,

heteroskedastisitas serta autokorelasi. Prasyarat analisis regresi linier berganda, ialah:

3.8.1.3.1 Uji Linieritas

Suatu hasil dikategorikan linier hingga informasi riset dituntaskan dengan Analisis regresi linier. Kebalikannya apabila informasi tidak linier hingga dituntaskan dengan Analisis regresi non- linier. Dengan menyamakan antara nilai F- Statistik dengan F- Tabel dengan taraf signifikan 5%, buat mengenali model linier ataupun tidak ialah:

- a) Bila nilai F-Statistik > F-Tabel, hingga hipotesis yang menyatakan bahwa model linier ditolak.
- b) Bila nilai F-Statistik < F-Tabel, hingga hipotesis yang menyatakan bahwa model linier merupakan diterima.

3.8.1.3.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan keadaan adanya ikatan linier ataupun korelasi yang besar antara tiap- tiap variabel leluasa dalam model regresi linierberganda. Multikolinieritas umumnya terjalin kala sebagian besar variabel yang digunakan silih terpaut dalam sesuatu model regresi. Buat mengetahui multikolinieritas bisa dilihat dengan nilai Variance Inflation Factor(VIF). Jika nilai $VIF \leq 5$ hingga tidak terjalin multikolinieritas.

3.8.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat yang wajib

terpenuhi dalam model regresi merupakan tidak terdapatnya indikasi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui terdapatnya heteroskedastisitas dengan menyamakan antara nilai t- tabel dengan t- hitung, ialah:

- a) Bila nilai $t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, berarti tidak ada heteroskedastisitas.
- b) Bila nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, berarti terdapat heteroskedastisitas.

3.8.1.3.4. Uji Autokorelasi

Korelasi antara sesuatu periode t(sehabis mempraktikkan aplikasi eplanning) dengan periode saat sebelum mempraktikkan aplikasi eplanning(¹³ t- 10). Secara simpel, analisis regresi merupakan buat memandang pengaruh antara variabel leluasa terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh terdapat korelasi antara observasi dengan informasi observasi tadinya. Buat mengetahui autokorelasi bisa dicoba dengan uji Durbin Watson(DW)(Ghozali, 2013: 110). Nilai Durbin Watson setelah itu dibanding dengan nilai d- tabel.

Hasil perbandingan hendak menciptakan kesimpulan semacam kriteria selaku berikut:

- a) Bila $d < d_l$; d_l , berarti ada autokorelasi positif
- b) Bila $d > (4 - d_l)$, berarti ada autokorelasi negatif
- c) Bila $d_u < d < (4 - d_l)$, berarti tidak ada autokorelasi
- d) Bila $d_l < d < d_u$ atau $(4 - d_u)$, berarti tidak bisa disimpulkan.

.....(Ghozali, 2013: 111)

3.8.1.4. Teknik Uji Analisis

Analisis informasi dalam riset ini memakai metode regresi ialah analisis regresi linier ganda. Analisis regresi merupakan buat mengenali pengaruh(ikatan) variabel leluasa terhadap variabel terikat. Pemilihan tipe analisis regresi linier berganda sebab dalam riset ini, terdiri dari 4 variabel leluasa:

daya guna(X1), mutu(X2), kuantitas(X3) serta waktu(X4) serta variabel terikat: aplikasi e- planning(Y).

Bila hasil analisis menampilkan signifikan, hingga garis regresi bisa diramalkan selaku ikatan yang kokoh antara nilai- nilai variabel leluasa serta variabel terikatnya. Besar kecilnya pengaruh antar variabel bisa diukur dari perhitungan nilai koefisien determinasi(r^2). Sebaliknya positif ataupun negatif ikatan antar variabel ditetapkan oleh ciri(+) ataupun(-) dari nilai koefisien regresi.

Persamaan regresi bisa digunakan buat melaksanakan prediksi seberapa besar nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen dimanipulasi.

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

Lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik, yang terletak antara 112° - 113° Bujur Timur dan 7° - 8° Lintang Selatan. Yang memiliki batas-batas antara

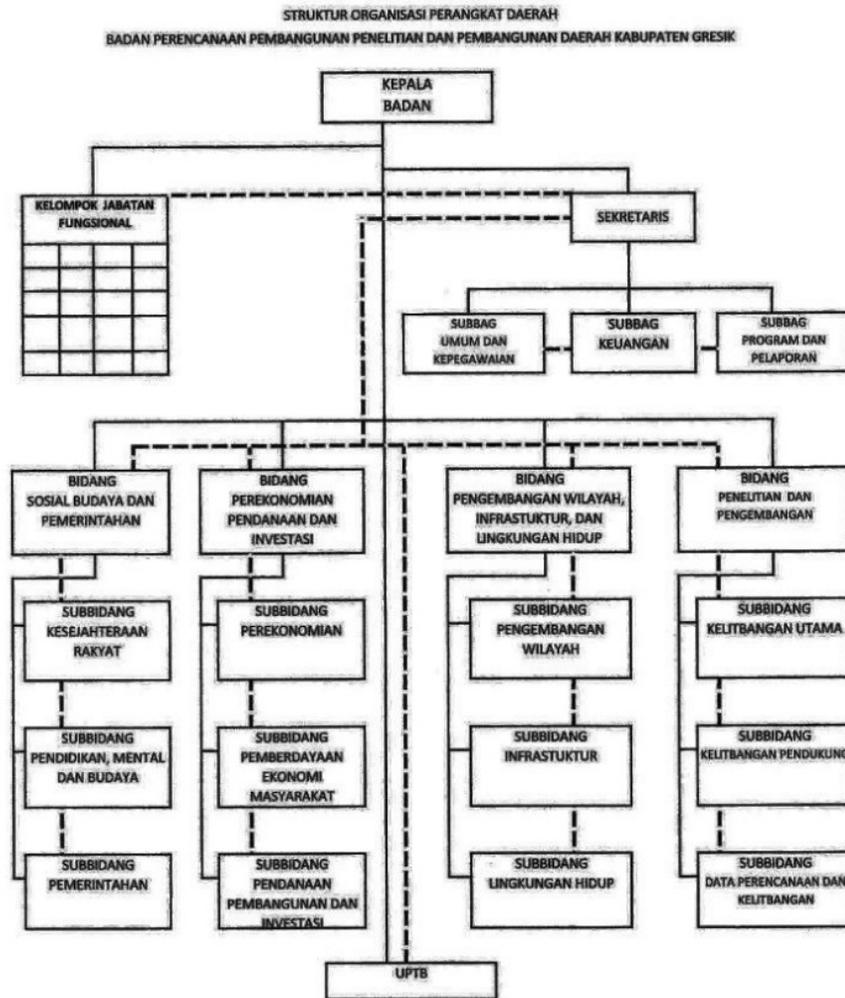
lain :

- a) Sebelah Utara = Laut Jawa
- b) Sebelah Selatan = Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya
- c) Sebelah Barat = Kab. Lamongan
- d) Sebelah Timur = Selat Madura

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Dua kecamatan yang berada di pulau Bawean, daerah Kabupaten Gresik ialah dataran rendah dengan ketinggian 2- 12 m di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian 25 m di atas permukaan air laut.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada struktur organisasi Bappeda Kabupaten Gresik dibawah ini, sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA Gresik



2. Demografis

² Penduduk Kabupaten Gresik bersumber pada proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.285.018 jiwa yang terdiri atas 637.095 jiwa penduduk pria serta 647.923 jiwa penduduk wanita. Sebaliknya bagi ² Dinas

Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat penduduk Kabupaten 45 penduduk pria serta 652. 681 penduduk wanita. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2017 menggapai 1. 103 jiwa/ km² dengan rata- rata jumlah penduduk per rumah tangga 3 orang.

3. Sosio Kultural

Pemerintah Kabupaten Gresik memusatkan kehidupan beragama buat amal serta kepentingan bersama sudah disediakan tempat-tempat ibadah bagi agama yang dianut, baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun oleh warga. Informasi yang di kumpulkan dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik menampilkan kalau pada tahun 2017 ada 1. 134 masjid, 3. 212 langgar, 16 gereja, 5 pura serta 1 vihara.

Kabupaten Gresik pula diketahui selaku Kota Santri yang di buktikan dengan kehidupan masyarakatnya yang kental sekali dengan kehidupan beragama Islam sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para Sunan(Wali Songo), di Gresik ada web aset agama Islam ialah Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim serta Makam Sunan Giri yang dikala ini ialah salah satu sumber pemasukan asli wilayah(PAD) dari zona pariwisata religi.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik diupayakan buat kenaikan produktivitas serta diversifikasi tumbuhan buat kebutuhan pangan serta kelestarian area. Penciptaan pertanian serta produktivitas tumbuhan pangan yang meliputi padi, jagung, kacang kedelai, ubikayu, ubi jalar, kacang tanah serta kacang hijau. Luas panen komoditas padi

sawah sebesar 67.903,6 Ha. Apabila dibanding dengan tahun 2016 hadapi peningkatan 2,41 persen. Untuk komoditas padi ladang, ubikayu, kacang kedelai serta kacang hijau apabila dibanding tahun 2016 hadapi penyusutan. Sebaliknya komoditas jagung, ubi jalar, kacang tanah, serta kacang hijau hadapi kenaikan.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik diupayakan untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi tanaman untuk kebutuhan pangan dan kelestarian lingkungan. Produksi pertanian dan produktivitas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kacang kedelai, ubikayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Luas panen komoditas padi sawah sebesar 67.903,6 Ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan 2,41 persen. Untuk komoditas padi ladang, ubikayu, kacang kedelai dan kacang hijau bila dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan komoditas jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami peningkatan.

Gambar 4.3
Persentase Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah, 2017



2

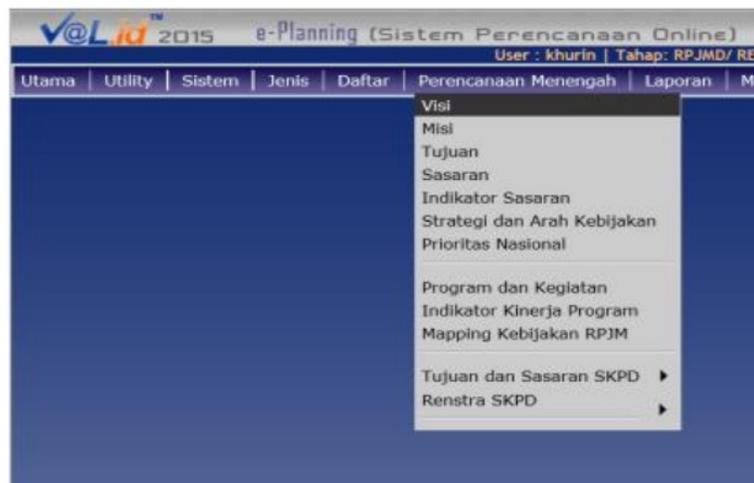
Sumber/Source: BPS Kabupaten Gresik-SIMTP 2016/Statistics of Gresik Regency-SIMTP

Kabupaten Gresik pula diketahui selaku kota bandar serta perdagangan internasional telah diketahui semenjak dulu, arus perdagangan ekspor- impor Kabupaten Gresik Gresik bisa diamati dari besaran ataupun volume serta nilai ekspor- impor Kabupaten Gresik pada Tabel 7. 1 hingga dengan Tabel 7. 2. Keseluruhan volume ekspor pada tahun 2017 menyusut dari tahun 2016. Volume ekspor tahun 2017 sebesar 1, 8 juta ton dengan nilai sebesar 1 milyar\$ US. Sebaliknya volume serta nilai impor Kabupaten Gresik pada tahun 2017 tiap- tiap sebesar 8, 03 juta ton dengan nilai 1, 57 milyar\$ US. Nilai impor tahun 2017 hadapi pe- ningkatan dibanding tahun 2016 meski bagi volume lebih sedikit dibanding tahun 2016.

4.2 Pemanfaatan *e-Planning* dalam Penyusunan RKPD

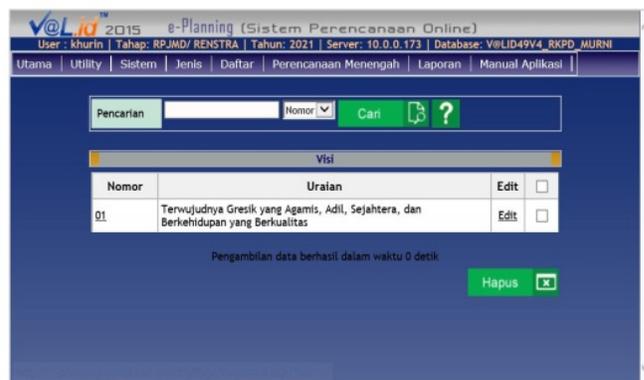
2.2.1. Penjelasan Fitur *e-Planning* dilengkapi/di dukung screenshot

Gambar 4.6 Screenshot menu Visi Gb. 3.1.1



Dalam aplikasi e planning pada tahap RPJMD/Renstra, setiap aktifitas yang terkait dengan perencanaan selalu diawali dari perencanaan menengah kemudian tinggal klik pada Visi setelah itu baru di isikan Visi Bupati atau **kepala daerah terpilih** dengan mempertimbangkan **isu-isu strategis**, permasalahan **pembangunan**, dan memperhatikan kebijakan nasional maupun regional, sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik, seperti tampak pada Gb. 3.1.2.

Gambar 4.7 Screenshot isian Visi Gb. 3.1.2



Tampak jelas bentuk isian visi Bupati /Kepala Daerah terpilih contoh sudah terisi seperti pada Gb. 3.1.2.

Gambar 4.8 Screenshot menu Misi Gb. 3.1.3



Misi Bupati terpilih atau **kepala daerah terpilih** dengan mempertimbangkan **isu-isu strategis**, permasalahan **pembangunan**, dan memperhatikan kebijakan nasional maupun regional, sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik, ada beberapa misi, sebagaimana tampak pada Gb. 3.1.4.

Gambar 4.9 Screenshot isian Misi Gb. 3.1.4

The screenshot shows a web application interface for 'e-Planning (Sistem Perencanaan Online)'. At the top, there is a navigation menu with items like 'Utama', 'Utility', 'Sistem', 'Jenis', 'Daftar', 'Perencanaan Menengah', 'Laporan', and 'Manual Aplikasi'. Below the menu is a search bar with a 'Pencarian' label, a text input field, a 'Nomor' dropdown, and a 'Cari' button. The main content area displays a table titled 'MISI' with the following data:

Nomor	Uraian	Edit
01	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri	<input type="checkbox"/>
02	Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik	<input type="checkbox"/>
03	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan	<input type="checkbox"/>
04	Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the table, there is a status message: 'Pengambilan data berhasil dalam waktu 0 detik'. Below this message are two buttons: 'Tambah' (Add) and 'Hapus' (Delete).

Visi dan Misi merupakan salah satu isian yang harus masuk dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) / Renstra (Rencana Strategis) sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang di break down dari RPJMD dan Renstra.

Gambar 4.10 Screenshot menu Tujuan Gb. 3.1.5



Menu selanjutnya yaitu pada menu Tujuan ⁴⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 seperti pada Gb. 3.1.6.

Gambar 4.11 Screenshot Tujuan sudah terisi Gb. 3.1.6

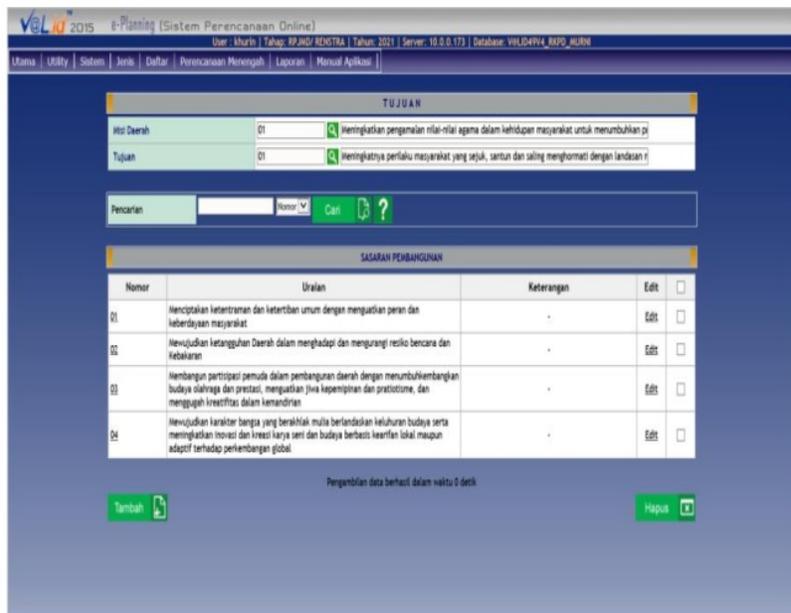


Gambar 4.12 Screenshot menu Sasaran Gb. 3.1.7

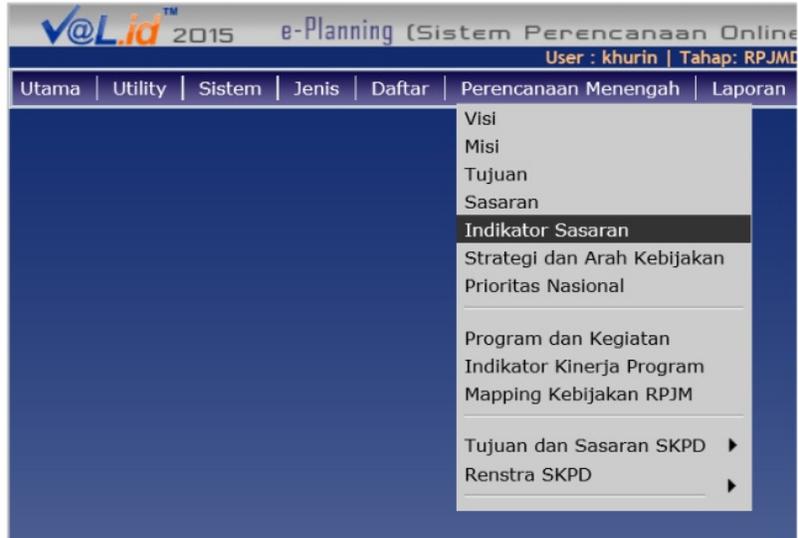


Tahapan selanjutnya masuk pada menu Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJMD/Renstra sebagaimana Gb. 3.1.8

Gambar 4.13 Screenshot Sasaran sudah terisi Gb. 3.1.8

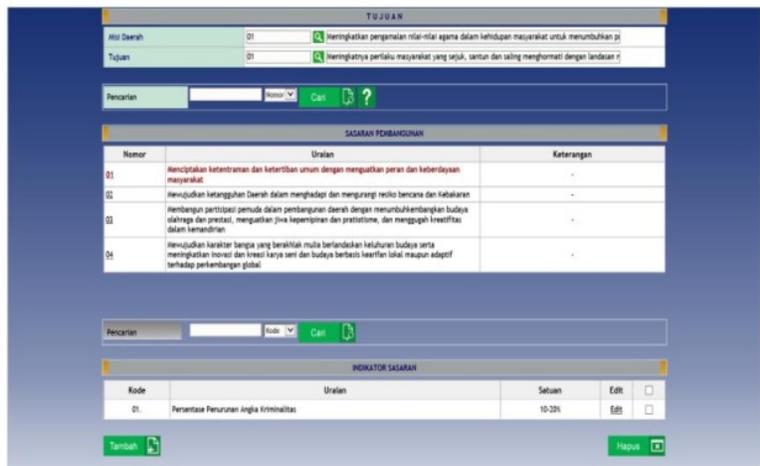


Gambar 4.14 Screenshoot menu Indikator Sasaran Gb. 3.1.9.



Setelah entry pada Sasaran maka untuk langkah selanjutnya yaitu masuk kepada menu Indikator Sasaran, sebagaimana tampak pada Gb. 3.2.0

Gambar 4.15 Screenshoot Indikator Sasaran sudah terisi Gb. 3.2.0



Form isian Indikator Sasaran yang sudah di entry, yaitu dengan melihat kondisi yang sudah dicapai yang di buktikan dengan pencapaian target terhadap kondisi awal (0%).

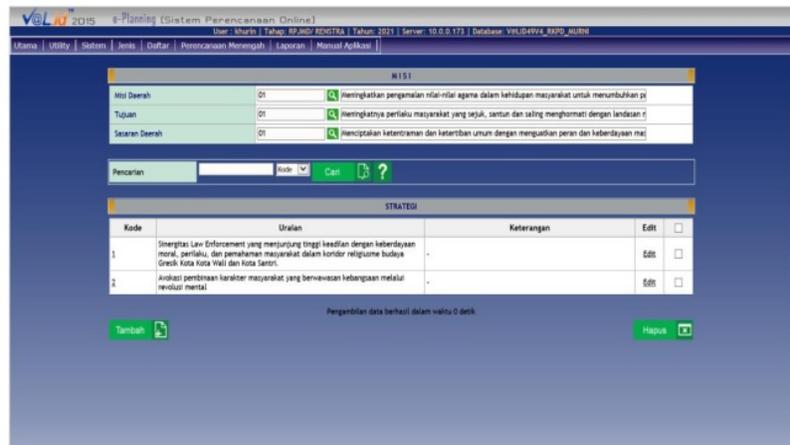
Gambar 4.16 Screenshoot menu Strategi dan arah kebijakan Gb. 3.2.1.



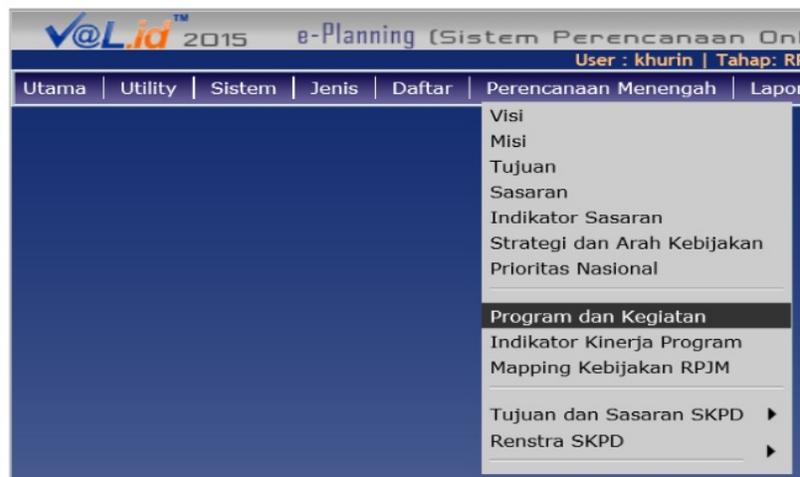
Menu berikutnya ialah Strategi serta Arah Kebijakan pembangunan kabupaten Gresik wajib ⁵ mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut selaku acuan dalam memastikan strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019, sebagaimana Gb. 3. 2. 2.

Gambar 4.17 Screenshoot Strategi dan arah kebijakan sudah terisi Gb.

3.2.2.



Gambar 4.18 Screenshoot menu Program dan kegiatan Gb. 3.2.3.

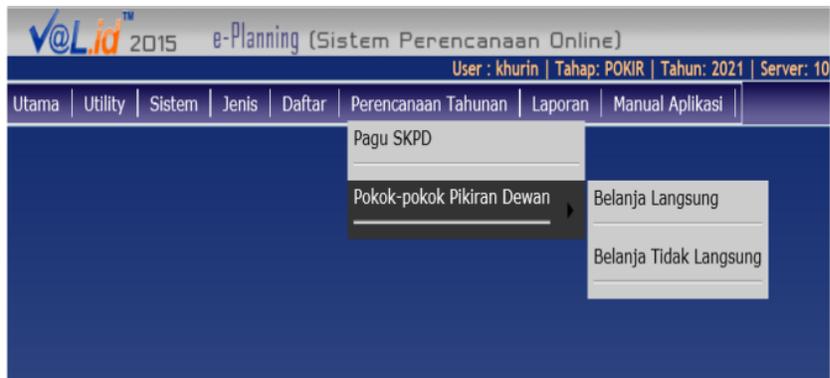


Selanjutnya masuk pada **Program dan Kegiatan** untuk mengentry **Program dan Kegiatan dalam** perencanaan **pembangunan** untuk menentukan kode rekening belanja dan RKA maupun DPA. Sebagaimana Gb. 3.2.4.

Gambar 4.19 Screenshoot Program dan kegiatan sudah terisi Gb. 3.2.4.

Kode	Uraian	Capaian Program	Target 1	Target 2	Target 3	Target 4	Target 5	Type	Edit
15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven 2. Persentase Peningkatan Kompetensi Sertifikasi Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	4,00%, 5,00	4,35%, 5,00	4,17%, 7,14	8,00%, 11,11	11,11%, 12,00	D	Edt
16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase Penempatan Pencari Kerja	67,02%	68,00%	69,01%	71,01%	72,01%	D	Edt
17.	PROGRAM PERLUKONGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA NETTING/AGUKAM	Persentase perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Penurunan Pencaharaan	9,56%	9,59%	9,65%	9,63%	9,62%	D	Edt
18.	PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan	92,86%	93,33%	93,75%	94,12%	94,46%	D	Edt

Gambar 4.20 Screenshot menu Pokok Pikiran Dewan 3.2.5.



Pada aplikasi e Planning tahap Pokok-pokok Pikiran Dewan masuk melalui perencanaan tahunan sebagaimana tampak pada Gb. 3.2.5.

Gambar 4.21 Screenshot Pokok Pikiran Dewan yang sudah terisi Gb.

3.2.6.

Kode	Uraian	Unit Pelaksana	Jumlah	Edit
5.1.7.03.001.19.01	Infrastruktur Pertanian Desa - Jalan Usaha Tani (LUT)	DINAS PERTANIAN	300.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.20.02	Infrastruktur Olah Raga - Pembangunan Sarana Desa/ Lapangan Desa	DINAS KEPERUSAHAAN DAN OLARAGGA	900.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.21.01	Infrastruktur Malak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	200.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.22.01	Infrastruktur Pemerintahan Desa - Balai Desa	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	400.000.000,00	Edit
5.1.7.03.001.22.02	Infrastruktur Pemerintahan Desa - Kantor Desa	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	400.000.000,00	Edit
Sub Total			2.250.000.000,00	
Grand Total			3.000.000.000,00	

Pada Gb. 3.2.6. tampak hasil entry pokok-pokok pikiran anggota DPRD, sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.

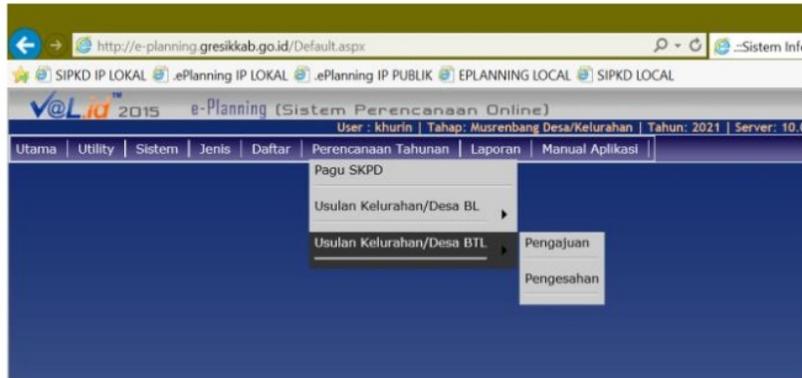
Gambar 4.22 Screenshot user name untuk per masing-masing anggota dewan 3.2.7.

User ID	Nama User	Group	Status	Keterangan	Edit
Pokir06	H. Reban, S.Pd., M.Pd	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir07	Faith Uman, SE., M.Si	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir08	Drs. Mubin	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir09	H. Mustajab, S.Sos., MH	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir5	Mujin Ridwan, SH	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir50	Drs. H. Sunaraji	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir51	Esfar	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir52	Naohhan, SH, MH	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir54	Ahmed Har Hamim	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit
Pokir55	Khuzul Fithan	Blok POKIR	Buka	Operator POKIR	Edit

Pada Gb. 3.2.7. tampak user name per masing-masing anggota DPRD

a.1. Screenshot menu Usulan Masyarakat dan informasi user name yang diberikan (apakah tiap kelurahan dan kecamatan sudah memiliki user name)

Gambar 4.23 Screenshoot menu Usulan Masyarakat Desa/Kelurahan
Gb. 3.2.8.



Gb. 3.2.8. menunjukkan menu usulan dari hasil musyawarah desa dan Musrenbangdes melalui aplikasi *e Planning*.

Gambar 4.24 Screenshoot menu Usulan Masyarakat Kecamatan Gb.
3.2.9.



Gb. 3.2.9. menunjukkan menu usulan dari usulan desa yang sudah masuk *ePlanning* dan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

Gambar 4.25 Screenshoot user name untuk masing-masing

Desa/Kelurahan Gb. 3.3.0

User ID	Nama User	Group	Status	Keterangan	Edit
Abel	Desa Ular Abel	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
acBera	Desa Anbang-Anbang Watangyo	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
asempanak	Desa Asempanak	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
Babalbano	Desa Babalbano	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
Babalant	Desa Babalant	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
Babatan	Desa Babatan	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
Balikeras	Desa Balikeras	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
BalangD	Desa Balangganggang	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
BalangMala	Desa Balangmala	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit
BalangT	Desa Balangtanjung	Block Desa	Suka	Operator Desa	Edit

Gb. 3.3.0. menunjukkan user name masing-masing operator desa/kelurahan

Gambar 4.26 Screenshoot user name untuk masing-masing Kecamatan

Gb. 3.3.1.

User ID	Nama User	Group	Status	Keterangan	Edit
Balang	KECAMATAN BALANG PANGGANG	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
Berang	KECAMATAN BERANG	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
Orisanda	KECAMATAN ORISANDA	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
Dubuk	KECAMATAN DUBUKSAMPETAR	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
Dubut	KECAMATAN DUBUK	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
Gresik	KECAMATAN GRESIK	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
HutanB2	KECAMATAN BUNGAH	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
Isurme 2	KECAMATAN CERME	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
Selomas	KECAMATAN KEBONGAS	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit
SacTambah	KECAMATAN TAMBAK	Block Kecamatan	Suka	Operator Muser Kecamatan	Edit

Gb. 3.3.1. menunjukkan user name masing-masing operator Kecamatan.

4.3. Penjelasan Pemanfaatan *e-Planning* dalam Tahapan RKPD

Semua usulan pembangunan merupakan bahan ⁴⁷ dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus melalui proses

tahapan yaitu Musrenbang ¹¹ Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten, usulan-usulan dari Musrenbang Desa sampai dengan Musrenbang Kabupaten harus masuk ke dalam aplikasi *e Planning*. Jika ada usulan yang tidak masuk di *ePlanning* maka usulan tersebut tidak akan dapat masuk ke dalam pembahasan penyusunan RKPD.

Melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), usulan yang sudah masuk ke dalam aplikasi *e Planning* akan dilakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai dengan prioritas yang sudah di tentukan, sedang usulan-usulan yang belum dapat terakomodir akan di tawarkan kepada anggota DPRD untuk diampu sebagai usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD, setelah pokok-pokok pikiran anggota DPRD sudah terpenuhi semua sesuai dengan plafon yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD maka BAPPEDA mengagendakan rapat untuk pembahasan penyusunan ¹¹³ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Manfaat *e-Planning* dalam tahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik antara lain (Integra, n.d.) :

- ⁴² Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara On-Line
- ⁷ Pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu
- Dapat diintegrasikan dengan aplikasi keuangan daerah (*e-Budgeting*) ⁶⁶ manapun dan aplikasi Kemendagri. ¹¹⁸ (Database Terintegrasi, Data

Perencanaan digunakan untuk Data sistem yang lain, Sistem Anggaran,

Sistem Evaluasi dan Monitoring, dan lain-lain)

- Menjaga sinkronisasi dengan RPJMD.
- Pengawasan serapan anggaran menjadi lebih mudah
- Proses perencanaan menjadi praktis dan mudah
- Mendukung single sign on (Satu login untuk beberapa Sistem)
- Pengajuan usulan pokok pikiran dewan.

JADWAL PENYUSUNAN RKPD 2019

No	Penyusunan RKPD 2019	Pelaksana	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun RKPD	Bappeda																												
2	Penyusunan dan Pengumpulan Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Renja Seluruh OPD	OPD																												
58	Penyusunan Agenda Kerja tim penyusun RKPD	Bappeda																												
4	Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan SIPD, Sektoral dan Lintas Sektoral Lainnya	Bappeda																												
5	Orientasi RKPD	Bappeda																												
6	Penyusunan Ranwal RKPD	Bappeda																												
7	Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD	Bappeda																												
8	Penyampaian Surat Edaran Ranwal RKPD	Bappeda																												
9	Pengajuan POKIR	DPRD																												
10	Penyusunan Ranwal Renja oleh OPD	OPD																												
11	Musrenbang RKPD Kecamatan	Kecamatan																												

dan dari Pokok-Pokok Pikiran Dewan sebagai bahan pembahasan¹³⁴ dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. *e-Planning* mampu mengintegrasikan dalam sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Gresik dengan penganggaran (*e budgeting*).
1. *e-Planning* mampu mengurangi adanya proyek tiba-tiba, artinya usulan tanpa melalui prosedur yang jelas tetapi lolos, kalau melalui *e-planning* maka tidak akan bisa lolos dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Dengan *e-planning* maka anggota DPRD dapat melihat usulan – usulan desa yang sudah masuk *e-planning* sesuai dengan hasil musrenbang¹¹ desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
3. Semua usulan dari Pokok-pokok pikiran Dewan yang tidak berasal dari usulan desa di masukkan kedalam *e-planning* melalui *e-pokir*.

1.5 Model Penerapan Aplikasi *e-Planning* dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)¹¹

1. Kelebihan (Faktor Pendukung) *e- Planning*.

E-Planning pada saat ini dipandang memiliki beberapa kelebihan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan dan RKPD Perubahan serta Pokir DPRD antara lain:

- Dalam melakukan Input data, proses, alur dan laporan sesuai dengan³³ Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan sebagai bahan pembahasan⁵ dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- **Penyusunan** laporan akan lebih cepat di bandingkan ³⁹ secara manual yang semula butuh waktu berminggu-minggu dapat terselesaikan dalam waktu hitungan detik.
- Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD Perubahan agar selaras dengan RPJMD dan membatasi SKPD hanya mengambil program kegiatan yang jadi urusannya saja.
- SKPD dapat input data program/kegiatan ⁷ secara online maupun offline
- BAPPEDA memiliki kemampuan untuk mengkoreksi dan memodifikasi rencana program/kegiatan yang telah diinput oleh SKPD.
- Permendagri No. 13 sebagai standar Referensi no rekening, nama program/kegiatan ⁷ dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- ⁷ Pagu indikatif untuk setiap SKPD sesuai dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah yang di buat oleh BAPPEDA.
- Data dapat rubah kedalam file excel.
- ⁷ Pemangku kepentingan agar dengan cepat memahami kesesuaian rencana yang telah disusun terhadap visi misi, prioritas, sasaran dan lokasi melalui menu analisis.
- ⁷ Sebagai wujud keterbukaan informasi pemerintah, maka aplikasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

- Bottom up atau Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan bentuk usulan masyarakat yang dapat tertampung dalam *e-planning*.

2. Kekurangan (Faktor Penghambat) dari *e-planning*

Disamping memiliki kelebihan, aplikasi *eplanning* juga memiliki beberapa kekurangan yang harus dibenahi dan harus di berikan analisis sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan aplikasi *e-planning*, kekurangan dari *e-planning* tersebut adalah :

- *E-planning* saat ini belum bisa terintegrasi *e budgeting* (penganggaran) yang ada di BPPKAD sehingga dalam pelaksanaan sinkronisasi dengan ⁸⁸ pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD masih menggunakan secara manual.
- *E-planning* belum bisa mengintegrasikan dokumen pendukung usulan yang bisa menyatakan layak dan tidak layak secara on line, tetapi semua masih dilakukan dengan manual

1.6 Analisa strategi kelebihan dan kekurangan dengan analisis SWOT

⁷⁵ Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategi bisnis, apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. Penjabaran analisis SWOT tentang kelebihan dan kekurangan *e-planning* antara lain :

- *Strengths* (kekuatan) dilihat dari kekuatannya maka *e planning* memiliki kekuatan dan lebih efektif dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Dalam melakukan ⁷ Input data, proses, alur dan laporan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010
 2. Penyusunan laporan akan lebih cepat
 3. Kesesuaian dokumen ³⁹ RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD Perubahan selalu dijaga sehingga selaras dengan RPJMD dan memproteksi SKPD hanya dapat mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.
 4. ⁷ Dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi pemerintah.
 5. ⁷ Pagu indikatif untuk setiap SKPD sesuai dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah yang dibuat oleh BAPPEDA menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun anggaran.
- *Weaknesses* (kelemahan), kelemahan dari *e-planning* dalam proses penyusunan RKPD antara lain :
1. Aplikasi *e planning* dengan harapan dapat terintegrasi dengan *e budgeting* (penganggaran), tetapi sampai saat ini *eplanning* belum bisa terhubung secara on line.
 2. Dengan aplikasi *e planning* ternyata belum dapat melakukan verifikasi secara on line karena masih bisa dipengaruhi oleh kebijakan executive dan legislatif, sehingga batasan waktu yang sudah di sepakati masih bisa diubah-ubah.

3. Anggota DPRD yang mau memberikan Pokirnya kepada desa tidak secara obyektif tetapi mereka memberikan Pokirnya berdasarkan kedekatan dan jasa politik

➤ *Opportunities* (peluang), peluang *e planning* dalam sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rangka proses penyusunan RKPD antara lain :

1. RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD Perubahan harus dijaga kesesuaiannya selaras dengan RPJMD dan memberikan batasan kepada SKPD agar mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.

2. SKPD dapat input data program/kegiatan secara online maupun offline.

➤ *Threats* (ancaman), ancaman aplikasi *e planning* dalam sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD antara lain :

1. *E Planning* belum bisa terintegrasi dengan *e budgeting* (penganggaran) sehingga dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masih menggunakan manual.

2. *E-planning* belum bisa mengintegrasikan dokumen pendukung usulan yang bisa menyatakan layak dan tidak layak secara on line, tetapi semua masih dilakukan dengan manual

4.7 Efektivitas Aplikasi *E-Planning* dalam Proses Penyusunan RKPD

²⁵ Ketersediaan informasi di dalam *E-Planning* diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah dengan ²⁵ memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Sebagai upaya ¹⁰⁹ terbangunnya sikap positif para stakeholder dan menghindari sikap apriori terhadap program-program pembangunan di daerah akibat keterbatasan informasi.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik tentang penerapan *E-Planning* ¹¹ dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan :

1. Mensinkronisasikan dengan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan ⁴⁰ dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan serta ⁶⁰ meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah tentang penerapan aplikasi *E-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. ⁶⁰ Pemanfaatan aplikasi *E-Planning* dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menampung masukan dan ajang berbagi pengalaman daerah dalam pengembangan dan pembangunan.
3. Meningkatkan peran Sistem Informasi Daerah di Kabupaten Gresik sebagai aplikasi Sistem Informasi Pembangunan yang telah di rekomendasikan oleh pemerintah pusat (Dirjen Bangda) ⁶⁰ dalam

perencanaan pembangunan daerah dengan memaksimalkan penerapan aplikasi *E-Planning*..

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang dihasilkan berbentuk angka atau statistik. Dari data yang didapat dilakukan analisis dengan menggunakan software SPSS. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik dan faktor-faktor apa yang menghambat aplikasi *e-planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik. Dengan tujuan yang didasarkan, data dikumpulkan dengan kuesioner sebanyak 65 responden yang sarannya pegawaidilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA). Aplikasi *eplanning* dan RKPD. Kuesioner yang dibuat dengan variabel yang diteliti memiliki 23 macam kalimat yang ditanyakan untuk efektivitas, 12 item pertanyaan untuk kualitas, 11 item pertanyaan untuk kuantitas dan 19 item pertanyaan untuk waktu.

5.1 Deskripsi Objek Penelitian

Teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menyebar kuesioner secara langsung kepada responden sebanyak 75 kuesioner yang didistribusikan, dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 69 kuesioner dan 6 kuesioner tidak kembali. Dari 69 kuesioner yang kembali 4 kuesioner tidak terisi penuh, sehingga jumlah kuesioner yang layak sebagai sampel sebanyak 65 kuesioner

saja yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Perincian pendistribusian dan pengembalian kuesioner data distribusi sampel penelitian sebagai berikut :

Tabel 5.1
Data Distribusi Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebarkan	75
2.	Jumlah Kuesioner yang kembali	69
3.	Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	6
4.	Jumlah Kuesioner yang kembali dan tidak lengkap	(4)
5.	$Respon\ rate = 65/75 \times 100\%$	86,6%
6.	Data yang diperoleh	65

Sumber : Data Primer Diolah 2020

5.1.1 Deskripsi Data

Hasil inventarisasi kuesioner yang diterima maka dapat klasifikasikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, posisi terakhir, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja.

5.1.1.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden			Total	Prosentase
	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
Laki-laki	0	18	15	33	50,75%
Perempuan	5	21	6	32	49,25%
Total	5	39	21	65	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa jenis kelamin yang menjadi responden antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan 1,5 % hampir sama atau tidak terjadi dominasi, dimana laki-laki sebanyak 33 orang atau 50,75%, sedangkan perempuan sebanyak 32 orang atau 49,25%.

5.1.1.2 Data Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3
Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden			Total	Prosentase
	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
24 – 34 Th	0	9	3	12	18,5%
35 – 45 Th	4	17	6	27	41,5%
46 – 56 Th	1	13	12	26	40%
32 total	5	39	21	65	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada Bappeda dan Kasub Bagian Program di OPD yang 24-34 tahun yang menjawab Kurang Setuju sebanyak 0 orang, yang menjawab Setuju sebanyak 9 orang, dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 3 orang, sehingga totalnya 12 orang yang menjawab atau sebesar 18,5%, usia 35-45 yang menjawab Kurang Setuju sebanyak 4 orang, yang menjawab Setuju sebanyak 17 orang, dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 6 orang, sehingga totalnya 27 orang yang menjawab atau sebesar 41,5%, , dan usia 46-56 tahun yang menjawab Kurang Setuju sebanyak 1 orang, yang menjawab Setuju

sebanyak 13 orang, dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 12 orang, sehingga totalnya 26 orang yang menjawab atau sebesar 40%.

5.1.1.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4
Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah Responden			Total	Prosentase
	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
SMA/SMK	0	0	2	2	3%
D III/S1	4	33	14	51	78,5%
S2	1	6	5	12	18,5%
Total	5	39	21	65	100%

Tabel 5.4 responden dengan berpendidikan terakhir SMA sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, pendidikan D3/S1 sebanyak 51 orang atau sebesar 78,5%, sedangkan berpendidikan S2 sebanyak 12 orang atau sebesar 18,5%.

5.1.1.4 Data Responden Berdasarkan Posisi Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan posisi jabatan terakhir dapat dilihat pada tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel 5.5
Data responden Berdasarkan Posisi Terakhir

Posisi Terakhir	Jumlah Responden	Prosentase
Jabatan Fungsional Umum	18	28%
Calon Perencana	2	3%
Eselon IV	42	64,5%
Eselon III	3	7,5%
Total	65	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Tabel 5.5 responden dengan posisi terakhir sebagai jabatan fungsional umum sebanyak 18 orang (28%) menduduki jabatan Calon Perencana, sebanyak 2 orang (3%) menduduki jabatan Kasub Bagian Program setingkat eselon IV sebanyak 42 orang (64,5%) dan yang menduduki jabatan sebagai eselon III sebanyak 3 orang (4,5%) ikut serta dalam mengisi kuesioner ini.

16 5.1.1.5 Data Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel 5.6 diawah ini :

Tabel 5.6
Data Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Masa Kerja	Jumlah Responden			Total	Prosentase
	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
1 – 10 Th	0	11	2	13	20%
11 – 20 Th	4	16	7	27	41,5%
21 – 30 Th	1	7	7	15	23%
31 – 40 Th	0	5	4	9	14%
>41 Th	0	0	1	1	1,5%
7 Total	5	39	21	65	100

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Tabel 5.6 responden dengan lamanya bekerja 1 – 10 Tahun sebanyak 13 atau 20%, masa kerja 11-20 Tahun sebanyak 27 orang atau sebesar 41,5%, masa kerja 21-30 Tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 23%, masa kerja 31 – 40 Tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 14%, dan > 41th sebanyak 1 orang atau sebesar 1,5%.

5.2 Metode Analisis Data

5.2.1. Statistik Deskriptif

Data diperoleh dengan cara deskriptif sebagaimana yang tampak pada tabel 5.7 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.7
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviasi
Efektivitas	65	3	5	4.15	565
Kualitas	65	3	5	4.11	640
Kuantitas	65	3	5	4.17	601
Waktu	65	3	5	4.14	659
Valid N (listwise)					

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Penyajian data pada tabel 5.7 data statistik deskriptif diperoleh dari proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data, kemudian di masukkan variabel efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu ke dalam *soft ware* SPSS versi 25 maka akan keluar hasil berupa penyajian data statistik dengan penyajian numerik.

5.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

Kualitas pengumpulan data atau uji instrumen yaitu pengujian awal yang dilakukan terhadap instrumen pengumpulan data. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

5.2.2.1 Uji Validitas

Untuk mengetahui tingkat validitas alat pengukur (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara

mengkorelasikan setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Corelation*.

Untuk mengetahui apakah masing-masing pertanyaan valid, maka nilai r hitung $>$ r tabel. Koefisien korelasi tabel yang diambil adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan angka kritik 0,211 dan 0,195. Pertanyaan atau kuesioner yang gugur tidak lagi digunakan dalam penelitian dan yang digunakan untuk mengumpulkan data hanya yang valid saja. Berikut adalah hasil pengujian validitas variabel Efektivitas (E), Kualitas (Ku), Kuantitas (Ka), Waktu (W).

23
Tabel 5.8
Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,423	0,244	Valid
2	0,336	0,244	Valid
3	0,496	0,244	Valid
4	0,643	0,244	Valid
5	0,520	0,244	Valid
6	0,697	0,244	Valid
7	0,694	0,244	Valid
8	0,729	0,244	Valid
9	0,481	0,244	Valid
10	0,673	0,244	Valid
11	0,684	0,244	Valid
12	0,763	0,244	Valid
13	0,553	0,244	Valid
14	0,577	0,244	Valid
15	0,606	0,244	Valid
16	0,634	0,244	Valid
17	0,601	0,244	Valid
18	0,592	0,244	Valid
19	0,600	0,244	Valid
20	0,664	0,244	Valid
21	0,791	0,244	Valid
22	0,812	0,244	Valid
23	0,783	0,244	Valid

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel 5.8 hasil pengolahan data dengan memasukkan semua butir pertanyaan tentang variabel efektifitas yang dikorelasikan dengan skor jawaban responden kedalam *soft ware* SPSS versi 25 kemudian didapatkan hasil ternyata semua item / butir pertanyaan dinyatakan Valid, jika rtabel dengan signifikansi 0,05 adalah 0,244 dan hasilnya $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga kesimpulannya semua butir pertanyaan (1 – 23) dinyatakan Valid.

Tabel 5.9
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,424	0,244	Valid
2	0,479	0,244	Valid
3	0,508	0,244	Valid
4	0,414	0,244	Valid
5	0,479	0,244	Valid
6	0,674	0,244	Valid
7	0,684	0,244	Valid
8	0,603	0,244	Valid
9	0,702	0,244	Valid
10	0,803	0,244	Valid
11	0,825	0,244	Valid
12	0,807	0,244	Valid

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel 5.9 hasil pengolahan data dengan memasukkan semua butir pertanyaan tentang variabel kualitas yang dikorelasikan dengan skor jawaban responden kedalam *soft ware* SPSS versi 25 kemudian didapatkan hasil ternyata semua item / butir pertanyaan dinyatakan Valid, jika rtabel dengan signifikansi 0,05 adalah 0,244 dan hasilnya

⁷⁴ $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga kesimpulannya semua butir pertanyaan (1 – 12) dinyatakan Valid.

⁷
Tabel 5.10
Hasil Uji Validitas Variabel Kuantitas

²¹

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,577	0,244	Valid
2	0,553	0,244	Valid
3	0,515	0,244	Valid
4	0,837	0,244	Valid
5	0,838	0,244	Valid
6	0,836	0,244	Valid
7	0,401	0,244	Valid
8	0,342	0,244	Valid
9	0,836	0,244	Valid
10	0,780	0,244	Valid
11	0,751	0,244	Valid

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel 5.10 hasil pengolahan data dengan memasukkan semua butir pertanyaan tentang variabel kuantitas yang dikorelasikan dengan skor jawaban responden kedalam *soft ware* SPSS versi 25 kemudian didapatkan hasil ternyata semua item / butir pertanyaan dinyatakan Valid, jika r_{tabel} dengan signifikansi 0,05 adalah 0,244 dan hasilnya $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga kesimpulannya semua butir pertanyaan (1 – 11) dinyatakan Valid.

⁸
Tabel 5.11
Hasil Uji Validitas Variabel Waktu

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,676	0,244	Valid
2	0,683	0,244	Valid
3	0,715	0,244	Valid
4	0,743	0,244	Valid
5	0,644	0,244	Valid

6	0,571	0,244	Valid
7	0,880	0,244	Valid
8	0,753	0,244	Valid
9	0,747	0,244	Valid
10	0,736	0,244	Valid
11	0,808	0,244	Valid
12	0,788	0,244	Valid
13	0,793	0,244	Valid
14	0,818	0,244	Valid
15	0,851	0,244	Valid
16	0,740	0,244	Valid
17	0,741	0,244	Valid
18	0,718	0,244	Valid
19	0,618	0,244	Valid

83

Sumber : Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel 5.11 hasil pengolahan data dengan memasukkan semua butir pertanyaan tentang variabel waktu yang dikorelasikan dengan skor jawaban responden kedalam *soft ware* SPSS versi 25 kemudian didapatkan hasil ternyata semua item / butir pertanyaan dinyatakan Valid, jika r_{tabel} dengan signifikansi 0,05 adalah 0,244 dan hasilnya $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga kesimpulannya semua butir pertanyaan (1 – 19) dinyatakan Valid.

5.2.2.2 Uji Reliabilitas

1 Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Efektivitas (E), Kualitas (KA), Kuantitas (KU), Waktu (W). Sebagaimana yang di tampilkan pada tabel 5.12, sebagai berikut :

14

Tabel 5.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Efektivitas	0,761	Reliabel
Kualitas	0,899	Reliabel
Kuantitas	0,914	Reliabel
Waktu	0,962	Reliabel

Sumber : Data olah SPSS versi 25

Sebagaimana tabel 5.12 Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel (efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu) untuk menguji konsistensi keempat variabel kedalam *soft ware* SPSS versi 25 maka didapat nilai Cronbach's Alpha > 0,6 karena keempat variabelnya nilai Cronbach's Alphanya > 0,6 sehingga instrumen penelitian dari keempat variabel tersebut memiliki nilai konsistensi. Menurut (Hair et al 2010 : 92) bahwa Cronbach's Alpha adalah sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar dari nol sampai dengan satu. Menurut (Eisingerich dan Rubera 2010 : 27) bahwa Cronbach's Alpha adalah nilai tingkat keandalan minimum, adalah 0,70. Sehingga setelah variabel efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu sebagai (input) maka setelah di proses dengan menggunakan SPSS versi 25, ternyata output yang keluar > 0,70 outcomenya, maka impeknya yaitu hasilnya variabel tersebut adalah reliabel.

5.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi dalam riset ini bisa digunakan untuk memperkirakan dengan signifikan serta representif bila model regresi tersebut tidak menyimpang dari anggapan dasar klasik regresi berbentuk normalitas serta multikolinearitas.

5.2.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam riset ini dicoba dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan tingkatan signifikansi 5% ataupun lebih dari 0,05. Apabila P (probabilitas) 0,05 informasi berdistribusi wajar. Hasil uji normalitas secara lengkap disajikan secara ringkas pada tabel 5.13

Tabel 5.13
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardize residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,1

Sumber : Data olah SPSS versi 25

Untuk menguji tingkat normalitas dalam penelitian yang dilakukan dengan uji statistik melalui *soft ware* SPSS versi 25 dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga di dapatkan hasil P (probabilitas) > 0,05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal.

5.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dicoba dengan memakai tata cara enter ialah dengan memandang pada *Tolerance value* ataupun *Variance Inflation Factor* (VIF) bisa dilihat pada tabel 5.14

Tabel 5.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Efektivitas	1	117,647	Tidak Terjalin Multikolinearitas
Kualitas	0,834	39,845	Tidak Terjalin Multikolinearitas
Kuantitas	0,775	33,460	Tidak Terjalin Multikolinearitas
Waktu	0,803	89,178	Tidak Terjalin Multikolinearitas

Sumber : Data olah SPSS versi 25

Berdasarkan pada tabel 5.14 untuk menguji multikolinieritas dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *soft ware* SPSS versi 25, karena hasil nilai VIF antara 1 - 10, sedangkan nilai *tolerance* mendekati 1 atau diatas 0,1 dan kurang dari 0,10. Maka penelitian tersebut dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

5.2.3.3. Uji Homogenistisitas Berdasar Jenis Kelamin

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 5.15 di bawah ini :

Tabel 5.15
Hasil Uji Homogenistisitas berdasar Jenis Kelamin

EF TOT	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Based on Mean	,000	1	63	0,990
Based on Median	,009	1	63	0,923
Based on Median and with adjusted df	,009	1	61,668	0,923
Based on trimmed mean	,003	1	63	0,956

Sumber : Hasil dari *soft ware* SPSS

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 5.15 setelah data di masukkan kedalam *soft ware* SPSS versi 25, ternyata hasilnya didapat nilai signifikansi $(p) > 0,05$ hal tersebut menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang sama (homogen).

5.2.3.4 Uji Homogenistisitas berdasar Jenis Usia

Hasil uji homogenistisitas berdasar jenis usia jika probabilitas $> 0,05$, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 5.16 di bawah ini.

Tabel 5.16
Hasil Uji Homogenistisitas berdasar Jenis Usia

Kuanti TOT	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Based on Mean	,747	2	62	,478
Based on Median	,226	2	62	,798
Based on Median and with adjusted df	,226	2	61,451	,798
Based on trimmed mean	,730	2	62	,486

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 5.16 uji homogenistisitas berdasar jenis usia, setelah data di masukkan kedalam *soft ware* SPSS versi 25, ternyata hasilnya didapat nilai signifikansi ($p > 0,05$) hal tersebut menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang sama (homogen).

5.2.4. Uji Hipotesis

5.2.4.1 Hasil Uji Regresi Berganda

Hasil uji hipotesis yang didapatkan dengan bantuan SPSS versi 25 untuk persamaan model regresi berganda. Pada tabel 5.17 sebagai berikut:

Tabel 5.17
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandar dized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	245	256		956	343
	Efektivitas	185	100	178	1.842	070
	Kualitas (Ku)	-002	086	-002	-020	984
	Kuantitas (Ka)	521	090	534	5.772	000
	Waktu	258	077	289	3.370	001

a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data olah statistik SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.17 ³¹ *Standardized coefficients* beta ialah nilai koefisien Beta dari tiap variabel independen yang terdapat. Tetapi dalam analisis regresi linear berganda data tersebut tidak dipakai. Nilai koefisien beta tersebut digunakan dalam Path Analysis ataupun analisis jalan. *Standardized coefficients* beta biasa digunakan buat persamaan regresi dimana gunanya merupakan buat mengenali pengaruh daya guna yang diberikan antara variabel independen terhadap dependen, tetapi cuma berlaku pada dikala itu dengan ilustrasi itu. Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok perubah/ variabel X1(Daya guna), X2(Mutu), X3(Kuantitas) serta X4(Waktu)(selaku X) serta kelompok variabel Y(selaku Y) diatas, diperoleh nilai *Standardized coefficients* beta buat kelompok variabel X1 sebesar 178, kelompok variabel X2 sebesar - 002, kelompok variabel X3 sebesar 534 serta kelompok variabel X4 sebesar 289. Sehingga model persamaan regresi diperoleh sebagai berikut

:

$$KA = 245 - 0,185E - 002 Ku + 521 Ka + 258 W + e$$

- 1) Konstanta sebesar 245 koefisien positif berarti efektivitas, kualitas, kuantitas, waktu dan independensi aplikasi *eplanning* akan dapat meningkatkan efektivitas penyusunan RKPD.
- 2) Koefisien regresi efektivitas, dengan hasil sebesar 0,185 dengan koefisien positif. Tingginya efektivitas dalam melakukan kinerja entry data perencanaan pembangunan ke dalam aplikasi *eplanning* dapat meningkatkan efektivitas dalam penyusunan dokumen RKPD.

- 3) Koefisien regresi kualitas, dengan hasil sebesar -002 dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas dalam melakukan kinerja entry data perencanaan pembangunan ke dalam aplikasi *eplanning* dapat menurunkan/rendahnya kualitas perencanaan pembangunan.
- 4) Koefisien regresi kuantitas, dengan nilai sebesar 521 dengan koefisien positif. berarti semakin tinggi kuantitas dalam melakukan kinerja entry data perencanaan pembangunan ke dalam aplikasi *eplanning* dapat meningkatkan kuantitas dalam penyusunan dokumen RKPD.
- 5) Koefisien regresi waktu, dengan hasil sebesar 258 dengan koefisien positif. Berarti semakin pendek/singkatnya waktu dalam melakukan kinerja penyusunan RKPD ke dalam aplikasi *eplanning* dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam penyusunan dokumen RKPD.

5.2.4.2 Hasil Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkatan signifikansi 0,05. Bila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($P < 0,05$) hingga H_1 diterima, sebaliknya bila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$) hingga H_1 ditolak. Berikutnya hasil uji F disajikan pada tabel 5.17 berikut:

Tabel 5.17
Hasil Uji F

Persamaan	f hitung	f tabel	p-value	Keterangan
Persamaan 1	66,078	2,37	0,00	Model fit
Persamaan 2	87.803	2,37	0,00	Model fit

Sumber : Data olah statistik SPSS 25

Dari Tabel 5.17 nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $66,078 > 2,37$ dan nilai signifikansi atau $p = 0,00$ karena $p < \alpha = 0,05$, maka persamaan 1 regresi dapat dipakai untuk memprediksi Aplikasi E-Planning, atau secara bersama-sama variable bebas Efektivitas, Kualitas, Kuantitas dan Waktu setelah di masukkan melalui *soft ware* SPSS versi 25, maka Aplikasi E-Planning di nyatakan berpengaruh terhadap penyusunan RKPD dengan taraf kepercayaan 95%, karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ sehingga H_1 diterima atau menunjukkan regresi yang fit. Sedangkan persamaan 2 memperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $87,803 > 2,37$ dan nilai signifikansi atau $p = 0,00$ karena $p < \alpha = 0,05$, maka persamaan 2 regresi dapat dipakai untuk memprediksi Aplikasi E-Planning, atau secara bersama-sama variable bebas Efisiensi, Kualitas, Kuantitas dan Waktu setelah di masukkan melalui *soft ware* SPSS versi 25, maka Aplikasi E-Planning di nyatakan berpengaruh terhadap penyusunan RKPD dengan taraf kepercayaan 95%, karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ sehingga H_1 diterima atau menunjukkan regresi yang fit. Kesimpulannya setelah variable kualitas dikeluarkan, ternyata F hitung naik dari 66.078 menjadi 87.803. Dengan demikian persamaan 2 lebih baik daripada persamaan 1.

5.2.4.3 Hasil Uji T

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($P < 0,05$) maka H1 diterima, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$) maka H1 ditolak. Hasil dari analisis uji t dapat ditunjukkan pada tabel 5.18 sebagai berikut:

Tabel 5.18
Hasil Uji t

Variabel	T hitung	T tabel	Sig.	Keterangan
Efektivitas	2,521	2,00	0,014	Signifikan
Kualitas	0,991	2,00	0,326	Tidak Signifikan
Kuantitas	5,244	2,00	0,000	Signifikan
Waktu	2,921	2,00	0,005	Signifikan

Sumber : Data olah SPSS 25

Berdasarkan data yang dihasilkan tabel 5.18 hasil uji t untuk variabel efektivitas nilai thitung (2,521) > ttabel (2,00) dengan nilai signifikansi $0,014 < \alpha = 0,05$, berarti H1 diterima sehingga efektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap Aplikasi *E-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Variabel kualitas diketahui nilai thitung (0,991) < ttabel (2,00) dengan nilai signifikansi $0,326 > \alpha = 0,05$. berarti H2 ditolak sehingga kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Aplikasi *E-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Variabel kuantitas diketahui nilai thitung (5,244) > ttabel (2,00) dengan nilai¹⁴ signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. berarti H3 diterima, sehingga kuantitas berpengaruh secara signifikan terhadap Aplikasi E-Planning¹¹ dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Variabel waktu diketahui nilai thitung (2,921) > ttabel (2,00) dengan nilai signifikansi $0,005 < \alpha = 0,05$. berarti H4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu berpengaruh secara signifikan terhadap Aplikasi *E-Planning*¹¹ dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.3 Pembahasan

5.3.1. Pengaruh Efektivitas Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)²⁹

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel efektivitas diketahui nilai thitung (2,521) > ttabel (2,00) dengan nilai signifikansi $0,014 < \alpha = 0,05$. berarti H1 diterima sehingga efektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap aplikasi *e-planning*¹¹ dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁴⁵ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani (2019), yang membahas tentang prinsip perencanaan yaitu partisipatif, berkesinambungan dan holistik, tetapi Juniawan (2019) bahwa perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *e-Planning*.¹⁰ *E-Planning* berperan pada fase Persiapan yaitu pengumpulan data dan informasi pembangunan, fase Strategi yaitu tahap memasukkan usulan pembangunan dan verifikasi usulan Musrenbang¹⁰ RPJMD, fase Integrasi yaitu mengintegrasikan visi misi, tujuan, sasaran sampai pada program daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Walaupun keduanya tidak membahas masalah efektivitas aplikasi *eplanning* tetapi mereka menyatakan bahwa dengan penerapan aplikasi *eplanning* akan meningkatkan atau mendapatkan hasil suatu perencanaan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem manual dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

5.3.2. Pengaruh Kualitas Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil analisis data pada tabel (5.18 : 120) menunjukkan bahwa variabel Variabel kualitas diketahui nilai thitung (0,991) < ttabel (2,00) dengan nilai signifikansi $0,326 > \alpha = 0,05$. Berarti H2 ditolak sehingga kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Aplikasi E-Planning dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Balqi Fahmi Sani, dkk (2017), bahwa untuk mendapatkan suatu perencanaan yang berkualitas maka harus dilakukan uji analisis dengan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan external, meliputi faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang dan faktor ancaman sehingga kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota akan mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi dan politik yang mungkin akan terjadi dalam masa tahun berjalannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah menjadi bagian dari perencanaan dalam dokumen perencanaan tahunan.

5.3.3 Pengaruh Kuantitas Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil analisis data pada tabel (5.18 : 120) menunjukkan bahwa variabel kuantitas diketahui nilai thitung (5,244) > ttabel (2,00) dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. berarti H3 diterima, sehingga kuantitas berpengaruh secara signifikan terhadap Aplikasi E-Planning dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harry Patrick Paat dkk (2018), bahwa perencanaan, pengelolaan pembangunan daerah yang baik dan efektif dapat meningkat laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, jadi perencanaan yang baik jika memiliki nilai manfaat bagi sejumlah kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kuantitas yang besar.

5.3.4. Pengaruh Waktu Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil analisis data pada tabel (5.18 : 120) menunjukkan bahwa variabel waktu diketahui nilai thitung (2,921) > ttabel (2,00) dengan nilai signifikansi $0,005 < \alpha = 0,05$. berarti H4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu berpengaruh secara signifikan terhadap Aplikasi E-Planning dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniawan (2019) (Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Bali) menyatakan bahwa mengadopsi sistem perencanaan terintegrasi Geyer (2006: 1) bahwa

perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *e-Planning*. ¹⁰ *E-Planning* berperan pada fase Persiapan yaitu pengumpulan data dan informasi pembangunan, fase Strategi yaitu tahap memasukkan usulan pembangunan ¹⁰ dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, fase Integrasi yaitu mengintegrasikan visi misi, tujuan, sasaran sampai pada program daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dari sisi efisiensi waktu lebih singkat atau membutuhkan waktu yang relatif sedikit untuk menyusun ⁸⁰ dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB VI

DISKUSI DAN TEMUAN TEORITIK

Pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Gresik adalah implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Aplikasi *E-Planning* yang dijalankan masih dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya website *E-Planning* tidak memberikan ruang yang interaktif bagi masyarakat. Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah antara lain server yang masih sering *error* dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login, terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pemrograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi *eplanning* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka dibawah berikut ini perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan aplikasi *eplanning*, antara lain :

Sebelum aplikasi <i>eplanning</i>	Sesudah aplikasi <i>eplanning</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan pembangunan harus diantar langsung ke Bappeda/OPD (off line) ➤ Usulan sering terjadi tidak sampai karena bisa tereliminasi dengan tiba-tiba / proyek tiba-tiba 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan pembangunan sudah on line, sehingga operator desa cukup on line di kantor desa ➤ Usulan terkunci di <i>eplanning</i> dan tahun berikutnya usulan yang belum tebantuan rakomodir masih

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan pembangunan terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan harus mengantar proposalnya ➤ Batasan waktu tidak ada secara jelas kesepakatan secara jelas sehingga sering terjadi molor dalam penetapan RKPD. 	<p>bisamasih bisa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan yang sudah masuk di aplikasi <i>eplanning</i> dapat dilihat oleh anggota DPRD yang ingin memberikan Pokok-pokok pikiran dewan (aspirasi). ➤ Waktu lebih singkat, sehingga penyusunan perencanaan yang menjadi. efisien. ➤ Memudahkan pemerintah dalam. membuat suatu kebijakan ataupun rencana ➤ Membantu Bappeda dalam menyusun RKPD dan menentukan pagu indikatif OPD
---	---

17

6.1 Peran dan Fungsi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Pembangunan Daerah

22

Sesuai amanat Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah, pemerintah wilayah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Wilayah(RKPD) yang ialah penjabaran dari RPJMD buat jangka waktu 1(satu) tahun. RKPD muat rancangan kerangka ekonomi wilayah, prioritas pembangunan wilayah, dan rencana kerja serta pendanaan buat jangka waktu 1(satu) tahun yang disusun bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negara No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Metode Perencanaan, Pengendalian serta Penilaian Pembangunan Wilayah, Tata Metode Penilaian Rancangan Peraturan Wilayah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wilayah Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah, dan Tata Metode Pergantian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wilayah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Wilayah, Serta Rencana Kerja Pemerintah Wilayah serta Peraturan Menteri Dalam Negara No 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Rencana Kerja Pemerintah Wilayah Tahun 2020, dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah(RKP)/ program strategis nasional dan RKPD Provinsi buat penataan RKPD Kab/ Kota. Dengan demikian RKPD memiliki peran, kedudukan serta guna yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah.

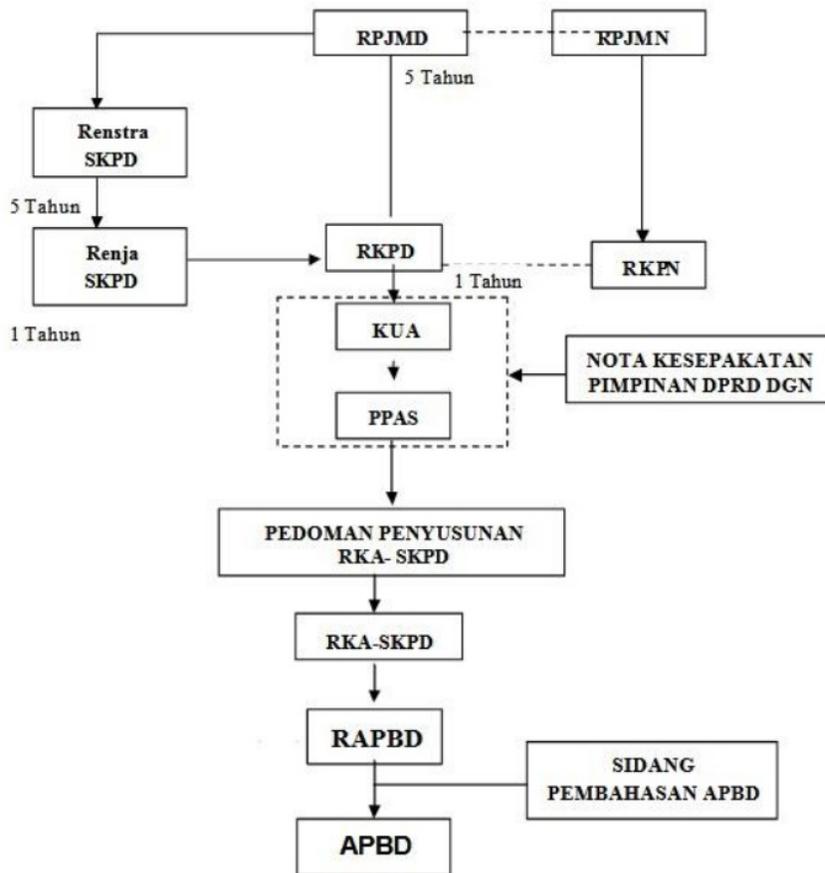
Penataan RKPD dicoba lewat ²⁰ tahapan musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan desa, kecamatan sampai kabupaten dan mencermati hasil penilaian penerapan pembangunan wilayah tahun tadinya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat ataupun provinsi. Penataan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional serta wilayah, tahapan serta tatacara penataan, pergantian, pengendalian serta penilaian, dan konsistensi perencanaan serta penganggaran cocok syarat peraturan perundang- undangan.

⁶ Selanjutnya RKPD tersebut jadi bahan untuk penataan Kebijakan Universal Anggaran(KUA) dan Prioritas serta Langit- langit Anggaran Sedangkan(⁶ PPAS). KUA- PPAS wajib menemukan persetujuan dari Legislatif. PPA yang sudah jadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan DPRD berikutnya jadi pedoman untuk tiap SKPD buat menyusun Rencana Kerja serta Anggaran (RKA), yang jadi bahan

masuk dalam penataan RAPBD. Sehingga lewat ulasan persidangan DPRD ditetapkanlah APBD. Semacam nampak pada diagram di dasar ini.

Bagan 6.1 Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD

**SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)**



6.2 Prinsip Dalam Penyusunan ⁶ Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

RKPD disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. ⁶ Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andani (2019) pada Bab II Tesis ini, dalam ¹² *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019, dengan judul *Perencanaan Pembangunan berbasis e-Planning di Kabupaten Subang* yang menyatakan bahwa ¹² Prinsip Perencanaan yang Ideal, menurut Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff dalam buku (Kartasasmita, 1993) bahwa Prinsip Perencanaan Ideal ada 3 (tiga) yaitu :

- a) ⁶ *Participative*, yaitu rakyat harus turut serta dalam prosesnya. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya.
- b) *Sustainable*, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya

kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip *sustainable* ini juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

- c) *Holistic*, sesuai dengan artinya "menyeluruh", prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari seluruh aspek, dan dalam keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Dengan demikian dengan adanya konsistensi antara RKPD dengan APBD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka akan terwujud sinergitas antara perencanaan dengan anggaran untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Harapannya, Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjalankan peran dan kewenangannya masing-masing yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

18

6.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditelaah mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, nasional, provinsi Jawa Timur, dan lokal dalam lingkup

Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Kabupaten Gresik tahun sebelumnya. Lebih lanjut, memperhatikan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021² serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan** maka prioritas pembangunan tematik dirumuskan sebagaimana berikut (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2019) :

1. Prioritas Pembangunan Tematik

Prioritas pembangunan tematik berlandaskan² tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan** mempertimbangkan⁵ prioritas nasional pada rancangan kerja pemerintah tahun 2019 meliputi :

- a) **Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;**
- b) **Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;**
- c) **Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;**
- d) **Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; dan**

e) **Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.**

Prioritas tema **pembangunan** Kabupaten Gresik juga memperhatikan **Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur**. Dengan **tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi**. Sedangkan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun perencanaan 2019 dijabarkan sebagaimana berikut (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2019) :

- a) **Pembangunan ekologi untuk mewujudkan kota layak huni berlandaskan keluhuran Gresik sebagai Kota Santri**
- b) **Pengembangan kemandirian infrastruktur dan konektivitas daerah dalam mendukung perekonomian secara berkelanjutan;**
- c) **Pemenuhan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan bersasaran melalui pemanfaatan integrasi pelayanan publik, pendekatan *human centered design* dan pembangunan sektoral;**
- d) **Penetrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;**

2. **Prioritas Program Pembangunan**

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dirumuskan berlandaskan **Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021** serta mempertimbangkan tema pembangunan **Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan.**

3. **Prioritas Output Kunci (Kegiatan)**

Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dirumuskan mempertimbangkan

tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan, 5 (lima) prioritas tematik, prioritas program pembangunan, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan operasional antara lain Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, dan dokumen Rencana Aksi Daerah antara lain Masterplan Gresik Smart City, Rencana Aksi Peduli HAM, dsb. Prioritas output kunci dimaknai sebagai keluaran kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk menunjang ⁷² sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

4. Sasaran Pembangunan RKPDP Tahun 2019

Sasaran Pembangunan ⁹⁹ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditelaah mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, nasional, provinsi Jawa Timur, dan lokal dalam lingkup Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Kabupaten Gresik tahun sebelumnya.

5. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Prioritas Pembangunan Tahun 2019 selain memperhatikan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan ²⁷ Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 2019

serta masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Penelaahan⁵⁰ dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.⁵ Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD memuat:

- a) Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dandikelompokkan kedalam urusan SKPD.
- b) Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan.
- c) Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
- d) Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
- e) Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

6.4 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)¹¹³

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam menyusun dokumen penganggaran yang disebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA terdiri dari rencana kerja SKPD dan K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan SKPD dan K/L.

Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPA, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 13/2006, Pasal 89) (Pengadaan, 2018).

- a) PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
- b) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- c) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
- d) Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan kuantabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja

- e) Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

6.5 Penyusunan KUA-PPAS Sebagai Pedoman dalam Penyusunan APBD

Sesuai amanat ⁴ Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang nantinya dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni (Pengadaan, 2016).

²⁸ Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sementara itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai sehingga penentuan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- Menentukan peprioritas program untuk masing-masing urusan;
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program;
- Prioritas pelaporan anggaran sementara memuat :
- Rancangan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
- Prioritas belanja;
- Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahab dan program;
- Rencana pembiayaan.

Kepala daerah dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetap Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain :

a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan PEMDA;

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan

c. Teknis penyusunan APBD

d. Hal-hal khusus lainnya

KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Sekda kepada Kepala Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

BAB VII

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

13 7.1. Kesimpulan

Penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab terdahulu terdapat kesimpulan bahwa aplikasi *e-planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terbukti telah mempermudah bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah maka pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan kinerja dengan tertib administrasi dan tepat waktu dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Gresik sudah melaksanakan amanat permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan menerapkan *e-planning* tetapi pelaksanaannya belum dapat maksimal.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Gresik pada periode Tahun 2016-2021 selain konsep substansif perencanaan yang mampu mengintegrasikan kaidah-kaidah perencanaan tetapi juga didukung dengan penggunaan teknologi yaitu *e-planning*, dengan pemanfaatan teknologi *e-planning* untuk memudahkan perencana dalam melaksanakan berbagai tahapan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan serta

mensinkronisasikan berbagai pendekatan perencanaan terutama pendekatan politis.

7.1.1 Peranan ¹²⁵Badan ⁴Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kabupaten Gresik

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. ⁴Bappeda Kabupaten/Kota menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses monitoring dan evaluasi.

Salah satu tolak ukur keberhasilan peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

⁴ Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musrenbang. Musrenbang yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di singkat RKPD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

⁴ Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk RKPD, dilakukan penyerapan dan penjangkaran aspirasi berupa forum Musrenbang. Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

7.1.2 Manfaat Aplikasi *e-Planning* dalam Penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan ¹⁰ (BAPPEDA) merupakan satu-satunya badan di daerah yang diwajibkan untuk menggunakan aplikasi perencanaan atau *e-planning*. ¹⁰ BAPPEDA Kabupaten Gresik juga menggunakan aplikasi perencanaan yang biasa disebut *e-planning*. Penggunaan aplikasi ini masih tergolong suatu hal baru karena *e planning* baru terapkan pada tahun 2017. ¹⁰ Meskipun masih tergolong baru namun manfaat yang diperoleh sangat membantu pekerjaan

pegawai/ASN dalam hal perencanaan. Penggunaan aplikasi perencanaan tidak rumit dan mudah dipahami sehingga pegawai yang bekerja di bidang perencanaan merasa terbantu dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan sistem perencanaan *e-planning* lebih banyak manfaatnya. Strategi perencanaan juga dilaksanakan dengan sistem perumpungan atau kerja sama tim, sehingga seluruh pegawai BAPPEDA ikut menjadi bagian dalam perencanaan menggunakan aplikasi *e-planning*. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penggunaan *e-planning* terdiri dari faktor pendorong atau pendukung dan faktor penghambat atau bisa lebih disebut dengan tantangan. Terdapatnya tantangan atau faktor penghambat tidak lekas menjadi penghambat dalam penerapan *e-planning*. Justru dari adanya tantangan tersebut membuat pihak BAPPEDA lebih tertantang untuk berusaha memperbaiki sistem, cara penggunaan *eplanning*, dan meningkatkan sumber daya manusianya.

¹⁴ 7.2 Saran

Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terdapat beberapa saran yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya ⁷³Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) sebagai salah satu OPD/SKPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan di Kabupaten Gresik khususnya pengelola aplikasi *eplanning* yang masih terdapat kekurangan, walaupun aplikasi *eplanning* sangat efektif dan efisien dalam ²⁹ proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik, saran dan masukan ini

semoga dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan aplikasi *eplanning* anatar lain :

1. Aplikasi *eplanning* bagi operator desa hanya digunakan pada saat memasukkan usulan pembangunan hasil dari musrenbang desa sekitar bulan Desember s.d Pebruari setelah itu operator desa berhenti dan lupa lagi, sehingga setiap tahun Bappeda selalu menugaskan stafnya untuk mengajari memasukkan usulan, itu sudah berjalan beberapa kali, hal itu disebabkan karena *eplanning* masih belum bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada di desa, misalnya siskeudes atau aplikasi lainnya. Jadi pada tahap penganggaran didesa masih of line belum bisa nyambung dengan *eplanning*.
2. Bappeda sebagai pengelola *eplanning* harus bisa memberikan tekanan atau pemahaman kepada kepala desa agar tidak selalu mengganti operator desa yang di tugaskan memasukkan usulan pembangunan ke dalam *eplanning* agar tidak selalu mengulang dari awal lagi.
3. Aplikasi *eplanning* belum bisa online dengan penganggaran (*ebudgeting*) sehingga dalam penganggaran masih dilakukan secara manual sehingga integrasi belum bisa terjadi.
4. Dengan aplikasi *eplanning* Bappeda harus berani membuat kesepakatan antara ⁴⁵ eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seharusnya RKPD lebih cepat terselesaikan dan penetapannya dapat lakukan tepat waktu, tetapi sering terjadi molor dalam penetapan RKPD sehingga berpengaruh juga dengan penetapan

APBD, itu disebabkan tidak tertibnya anggota DPRD dalam memasukkan usulan yang selalu minta di ganti yang berakibat rentang waktu yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bappeda yang benar-benar paham akan aplikasi *eplanning* sangat kurang sehingga untuk mengoperasikan atau melakukan pendampingan ke desa-desa dan OPD yang akan entry renja masih harus dilakukan penyegaran terkait aplikasi *eplanning* bagi pendamping atau pengajar yang akan di tugaskan mendampingi.

7.3 Rekomendasi

Dari paparan yang bersifat evaluatif pada bab-bab terdahulu sebagaimana yang dapat terbaca di bagian simpulan seperti di atas maka peneliti mencatat sejumlah rekomendasi yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penerapan aplikasi *eplanning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun secara lebih terperinci dapat terbaca sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya perbaikan fasilitas yang di tawarkan oleh aplikasi *eplanning* atau aplikasi lain sejenis *eplanning* tetapi mampu memberikan fasilitas atau menu yang lebih dari aplikasi *eplanning*, sehingga kedepan dapat terintegrasi mulai dari perencanaan (*planning*), penganggaran (*ebudgeting*), monitoring sampai dengan evaluasi dapat diintegrasikan dengan baik untuk menuju pemerintahan yang baik.

- 2) Pihak eksekutif harus berani menyampaikan dengan dasar hukum /peraturan yang berlaku kepada pihak legislatif agar tidak melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama agar penetapan RKPD dan APBD tepat waktu sesuai jadwal yang sudah di tentukan.

7.3.1 Implikasi Teoritis dan Urgensi Penelitian

7.3.1.1. Implikasi Teoritis Penelitian

Pada akhirnya penelitian ini memberikan implikasi teoritis yang menekankan betapa pentingnya Aplikasi *E planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang disampaikan Juniawan (2019) Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Balimenyatakan bahwa mengadopsi sistem perencanaan terintegrasi Geyer (2006: 1) bahwa perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *e-Planning*. *E-Planning* berperan pada fase Persiapan yaitu pengumpulan data dan informasi pembangunan, fase Strategi yaitu tahap memasukkan usulan pembangunan dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, fase Integrasi yaitu mengintegrasikan visi misi, tujuan, sasaran sampai pada program daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait dengan penelitian ini maka ada empat variabel yang menentukan efektivitas aplikasi *eplanning*, meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu :

- 1) Efektivitas, ukuran berhasil tidaknya aplikasi *e planning* dalam pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya yaitu perencanaan pembangunan kedalam sebuah Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Apabila suatu organisasi tercapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Jadi aplikasi *eplanning* yang di laksanakan di Kabupaten Gresik sudah efektif dan efisien jika bandingkan sebelum menggunakan aplikasi *eplanning* dengan sesudah menggunakan aplikasi *eplanning*. Input yang dilakukan oleh operator desa ke dalam *eplanning* yang selanjutnya akan diproses oleh operator kecamatan kemudian di eksekusi oleh operator kabupaten untuk di lakukan validasi dengan menentukan layak atau tidak layak dengan beberapa persyaratan yang kelanjutannya sebagai outputnya yaitu tertuangnya usulan-usulan tersebut ke dalam RKPD dan sebagai out comenya yaitu dilaksanakan suatu susulan tersebut yang merupakan salah satu indikator dari dampak atau akibat dilaksanakannya usulan tersebut.

- 2) Kualitas, kepuasan pelanggan sepenuhnya atau pengguna *eplanning* (full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen atau pengguna aplikasi, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Aplikasi *e planning* ini terbukti sudah memberikan kepuasan kepada penggunanya walaupun aplikasi *e planning* masih terdapat

kekurangan yang harus segera mendapatkan prioritas untuk perbaikannya.

- 3) Kuantitas, ¹⁴⁴ tolok ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti. Misalnya jumlah peserta suatu pertemuan, jumlah karyawan, dan lain sebagainya, maksudnya aplikasi *e planning* di katakan efektif jika jumlah atau nilai yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk menerapkan aplikasi *e planning* dengan hasil yang di dapatkan lebih besar (Jumlah Hasil yang didapatkan dari *e planning* > Jumlah Rupiah / Waktu yang di dikeluarkan = Efektif).

- ³⁷ 4) Waktu, Dalam Kamus Bahasa Indonesia paling tidak terdapat 7 item yang menjadi arti dari kata waktu antara lain (Departemen Pendidikan RI, 2008: 161) :

- ⁹³ a) seluruh rangkaian saat ketika proses; perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung; artinya serangkaian kegiatan ⁸⁰ dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

tentunya hanya butuh waktu yang singkat.

- ³⁷ b) lamanya (saat tertentu);
- c) saat tertentu untuk melakukan sesuatu;
- d) kesempatan, tempo, peluang;
- e) ketika, saat;
- f) hari (keadaan hari) dan
- g) saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia

7.3.1.2. Urgensi Penelitian

- 1) Hasil dari penelitian ini menjadi penting untuk diperhatikan dan kemudian ditindaklanjuti. Melihat betapa pentingnya aplikasi *e planning* yang efektif dan efisien dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka hasil penelitian ini menjadi pendorong agar pihak terkait bisa serius untuk melakukan evaluasi dan monitoring demi perbaikan aplikasi *e planning* yang sudah membantu dan mempermudah tugas dari Bappeda dalam penyusunan RKPD Kabupaten Gresik selama beberapa tahun terakhir ini.
- 2) Hasil penelitian ini adalah menemukan model tata cara kinerja dan tata kelola data usulan pembangunan yang di mulai dari Musrenbang Desa sampai Musrenbang Kabupaten sebagai implikasi dari aspirasi dari masyarakat bawah (*bottom Up*) yang di bahas oleh eksekutif dan legeslatif kemudian ada kesepakatan yang akan di bawah ke tingkat kabupaten yang di tetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memicu peneliti-peliti lain untuk melakukan penelitian serupa yang lebih sempurna lagi. Atmosfer ilmiah sangat penting dalam menunjang semua produk-produk Informasi Teknologi (IT) agar matang dan tepat perencanaan, tepat anggaran, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat implementasinya.

7.3.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian masih jauh dari kata sempurna mengingat hanya satu studi kasus yakni efektivitas aplikasi *e planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan terbatas pada satu lokus penelitian yaitu Bappeda Kabupaten Gresik sebagai OPD yang membidangi perencanaan dan pengelola aplikasi *e planning* yang merupakan cikal bakal aplikasi yang akan mampu mengintegrasikan tahapan perencanaan mulai entry usulan sampai pada penganggaran, evaluasi dan monitoring, untuk mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*).

Karena itu penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Masih diperlukan banyak lagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan dan kelemahan penelitian ini guna penyempurnaan aplikasi *e planning* yang masih banyak kekurangan dan sangat diperlukan perbaikan aplikasi *e planning* atau munculnya aplikasi lain yang memiliki fungsi sama tetapi lebih bagus dari aplikasi *e planning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Rahman, A. (2016). *Metode Penelitian Psikologi Langkah Cerdas Menyelesaikan Skripsi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Afifuddin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). No Title. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. Diambil dari <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/7537>
- Andani, D. (2019). *Perencanaan Pembangunan berbasis e-Planning di Kabupaten Subang*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4).
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Balqi Fahmi Sani, D. (2017). *Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis e Planning*. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1).
- Bappeda Jatim. (2013). *Potensi dan Produk Unggulan Jawa Timur : Kabupaten Gresik*. *bappeda prov jatim*. Diambil dari <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-gresik-2013.pdf>
- Bappeda Tanjung Balai. (2020). *RKPD 2020*. Diambil 18 Desember 2020, dari <https://bappeda.tanjungbalaiKota.go.id/rkpd-2020/>
- Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan RI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Fayol, H. (2007). ¹⁴² *Industri dan Manajemen Umum, Terj. Winardi*. London: Sir Issac and Son.
- ⁸⁷ Geyer, Y. (2006). *Integrated Development Planning. Handbook Series for Community-Based Organizations Institute for Democracy in South Africa (IDASA)*. Claremont, Cape Town: Top Copy.
- ¹³¹ Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- ³ Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- ⁹² Harry Patrick Paat, D. (2018). Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 02(02).
- ¹⁹ Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- ⁹⁷ Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Integra. (n.d.). Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah E-Planning. Diambil 13 November 2020, dari <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/>
- ¹²⁰ J., S. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Prencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ⁹² Juniawan, W. D. (2019). *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui*

Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang*, 5(3).

Kartasasmita, G. (1993). *Administrasi Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Kementerian Dalam Negeri. (2017). Pasal 47 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Diambil dari 123 <https://dprd.jabarprov.go.id/pdf/2019/Permendagri-No-86-TH-2017.pdf>

Kemertian 41 Dalam Negeri. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Diambil dari <http://web.jambiprov.go.id/assets/skpd/biro-organisasi/download/Permendagri542010danLampiran.pdf>

140 Koontz, H., O'Donnell, C., & Weihrich, H. (1996). *Manajemen* (Gunawan Hu). Jakarta: Erlangga.

Kumorotomo, W. (2005). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Wali Pers.

3 Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Martoyo, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya manusia* (8 ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Gresik. (2019). RKPD Kabupten Gresik 2019. Gresik: Bappeda Kabupaten Gresik.

Pemerintah Kota Jambi. (2017). EPlanning : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Jambi: PT. Raja Sakti Telematika. Diambil dari <http://bappeda.jambikota.go.id/eplanning/uploads/bantuan/USER MANUAL ePLANNING.pdf>

Pemerintah Provinsi Jatim. (2021). Dokumen RKPD Prov. Jawa Timur. Surabaya: Bappeda Prov. Jatim. Diambil dari 19

http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/dokren/rancangan_awal_rkpd_jatim_2021.pdf

Pengadaan. (2016). Pengertian KUA-PPAS dan Penyusunannya. Diambil 15 Desember 2020, dari <https://www.pengadaan.web.id/2016/12/pengertian-kua-ppas-dan-penyusunannya.html>

Pengadaan. (2018). Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Diambil 11 Desember 2020, dari <https://www.pengadaan.web.id/2018/06/rka.html>

Presiden RI. (2004). *Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004*. Jakarta. Diambil dari <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/26.pdf>

Presiden RI. (2014). *Pasal 11 Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah Tahun 2014*. Jakarta. Diambil dari <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

Putri, A. S. (2019). *Pengertian Pemerintah, Beda antara Pemerintah Pusat dan Pemda*. Diambil 26 Desember 2020, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all#:~:text=Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan,sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945>

R.Terry, G. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Riduwan. (2015). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Riyanto, Y. (2012). *Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Bagi Pendidik dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas*. Jakarta: Kencana.

- ¹²⁴ Schermerhorn, Jr., John, R. (1986). *Management for Productivity*. New York: John Willey & Sons.
- Sigit, S. (2003). *Esensi Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- ⁶² Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- ¹⁹ Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian* (10 ed.). Bandung: Alfabeta.
- ⁵² Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Press.
- ¹⁷ Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- ¹⁴⁷ Umar, H. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- ²³ Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuriah, N. (2006). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

DAFTAR LAMPIRAN

Paper_1

ORIGINALITY REPORT

37 %

SIMILARITY INDEX

36 %

INTERNET SOURCES

11 %

PUBLICATIONS

15 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.ums.ac.id

Internet Source

2 %

2

gresikkab.go.id

Internet Source

2 %

3

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2 %

4

www.pengadaan.web.id

Internet Source

2 %

5

www.scribd.com

Internet Source

2 %

6

www.pengadaanbarang.co.id

Internet Source

1 %

7

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1 %

8

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

1 %

9

fadly-ok.blogspot.com

Internet Source

1 %

10	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
11	text-id.123dok.com Internet Source	1%
12	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1%
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
15	kassel.bpk.go.id Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
17	core.ac.uk Internet Source	1%
18	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	1%
19	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
20	bappeda.sambas.go.id Internet Source	<1%
21	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%

22

bappeda.tanjungbalaikota.go.id

Internet Source

<1%

23

id.123dok.com

Internet Source

<1%

24

fr.scribd.com

Internet Source

<1%

25

issuu.com

Internet Source

<1%

26

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<1%

27

es.scribd.com

Internet Source

<1%

28

www.acehkontras.com

Internet Source

<1%

29

www.jdih-gresik.net

Internet Source

<1%

30

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1%

31

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1%

32

repository.uhn.ac.id

Internet Source

<1%

33	docplayer.info Internet Source	<1%
34	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
35	journalbalitbangdalampung.org Internet Source	<1%
36	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1%
37	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
38	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
39	www.jogjamedia.co.id Internet Source	<1%
40	karawangkab.go.id Internet Source	<1%
41	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1%
42	www.integraindonesia.co.id Internet Source	<1%
43	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
44	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam	

Bonjol Padang

Student Paper

<1%

45

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1%

46

muhifa.blogspot.com

Internet Source

<1%

47

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

48

mafiadoc.com

Internet Source

<1%

49

www.kompas.com

Internet Source

<1%

50

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

51

bimtek-diklat.com

Internet Source

<1%

52

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1%

53

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1%

54

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1%

55

www.europeanproceedings.com

Internet Source

<1%

56 zombiedoc.com Internet Source <1%

57 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta Student Paper <1%

58 Submitted to Sriwijaya University Student Paper <1%

59 media.neliti.com Internet Source <1%

60 www.bangda.kemendagri.go.id Internet Source <1%

61 Hanung Aditya Aristyatama. "Strategic Planning
for Public Sector Organizations", Advanced
Journal of Social Science, 2019
Publication <1%

62 123dok.com Internet Source <1%

63 tambahpinter.com Internet Source <1%

64 repository.upi.edu Internet Source <1%

65 eprints.umpo.ac.id Internet Source <1%

66

Internet Source

<1%

67

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

68

Indah Indi Afifah, Amat Jaedun. "The effect of bullying towards students grade IX learning achievement on mathematics", Journal of Physics: Conference Series, 2020

Publication

<1%

69

bappeda.pamekasankab.com

Internet Source

<1%

70

digilib.isi.ac.id

Internet Source

<1%

71

www.slideshare.net

Internet Source

<1%

72

bappeda.palukota.go.id

Internet Source

<1%

73

bulelengkab.go.id

Internet Source

<1%

74

Libriana Susanti. "Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2020

Publication

<1%

cpssoft.com

75

Internet Source

<1%

76

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

<1%

77

eprints.akakom.ac.id

Internet Source

<1%

78

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1%

79

adoc.pub

Internet Source

<1%

80

bappeda.depok.go.id

Internet Source

<1%

81

blog.lapor.go.id

Internet Source

<1%

82

digilib.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

83

ROCHMAT HIDAYAT HARIYONO.
"PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS
LAYANAN, DAN PERSEPSI HARGA
TERHADAP KEPUASAN (STUDI PADA
LAPANGAN FUTSAL HIDAYAT FUTSAL
SQUARE)", MANAJERIAL, 2018

Publication

<1%

84

Submitted to Universitas Merdeka Malang

Student Paper

<1%

85 anzdoc.com Internet Source <1%

86 bappeda.magelangkota.go.id Internet Source <1%

87 journals.co.za Internet Source <1%

88 vdocuments.site Internet Source <1%

89 ejournal.unesa.ac.id Internet Source <1%

90 etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source <1%

91 eprints.uny.ac.id Internet Source <1%

92 journal.budiluhur.ac.id Internet Source <1%

93 nurezicom.wordpress.com Internet Source <1%

94 repository.its.ac.id Internet Source <1%

95 sbsm-stks.blogspot.com Internet Source <1%

96 www.docstoc.com

Internet Source

<1%

97

pspi.upi.edu

Internet Source

<1%

98

repository.univ-tridinanti.ac.id

Internet Source

<1%

99

www.bappeda.kulonprogokab.go.id

Internet Source

<1%

100

bappeda.belitungkab.go.id

Internet Source

<1%

101

bappeda.pontianakkota.go.id

Internet Source

<1%

102

docobook.com

Internet Source

<1%

103

hendrasetyawan1jt.blogspot.com

Internet Source

<1%

104

repository.fisip-untirta.ac.id

Internet Source

<1%

105

www.bpk.go.id

Internet Source

<1%

106

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

<1%

107

Aristya Windiana Pamuncak. "PUNISHMENT

<1%

FOR THE EXTRAORDINARY CRIME
PERPETRATOR ON CHILDREN ECONOMIC
EXPLOITATION IN INDONESIA COMPARISON
OF LAW IN AUSTRALIA, SENEGAL AND
ENGLAND", Humanities & Social Sciences
Reviews, 2019

Publication

108	"Documents", Yearbook of International Humanitarian Law, 2009 Publication	<1%
109	kobarksb.com Internet Source	<1%
110	live-look-no.icu Internet Source	<1%
111	padangmedia.com Internet Source	<1%
112	soalterbaru.com Internet Source	<1%
113	dokumen.tips Internet Source	<1%
114	marno.lecture.ub.ac.id Internet Source	<1%
115	Submitted to Kookmin University Student Paper	<1%
116	Submitted to Universitas Negeri Jakarta	

Student Paper

<1%

117 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source

<1%

118 integraindonesia.co.id
Internet Source

<1%

119 Submitted to Universitas Wahid Hasyim
(Semarang)
Student Paper

<1%

120 ojs.uma.ac.id
Internet Source

<1%

121 repository.upstegal.ac.id
Internet Source

<1%

122 Eliza Noviriani, Anniza Dwi Febrianty.
"Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah:
Studi pada 10 Provinsi di Indonesia", Indonesian
Treasury Review Jurnal Perbendaharaan
Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2017
Publication

<1%

123 Submitted to Ritsumeikan Asia Pacific
University
Student Paper

<1%

124 jurnal.fkip.unila.ac.id
Internet Source

<1%

ppid.nganjukkab.go.id

125	Internet Source	<1%
126	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
127	repository.unj.ac.id Internet Source	<1%
128	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1%
129	jurnal.stietribuana.ac.id Internet Source	<1%
130	oborulumeak.blogspot.com Internet Source	<1%
131	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
132	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
133	repository.usd.ac.id Internet Source	<1%
134	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1%
135	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
136	Annisah Annisah. "USULAN PERENCANAAN	<1%

SMART CITY : SMART GOVERNANCE
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO*", Masyarakat Telematika Dan
Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi
dan Komunikasi, 2018

Publication

137	Dwi Febri S, Sri Rahayu, Wiralestari. "Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kota Jambi)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2019	<1%
-----	--	-----

Publication

138	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman	<1%
-----	---	-----

Student Paper

139	bappeda-litbang.okuselatankab.go.id	<1%
-----	--	-----

Internet Source

140	lukmanrohimin.blogspot.com	<1%
-----	--	-----

Internet Source

141	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1%
-----	--	-----

Internet Source

142	repository.widyatama.ac.id	<1%
-----	--	-----

Internet Source

143	snpm.unipasby.ac.id	<1%
-----	--	-----

Internet Source

144	www.freedomnesia.id Internet Source	<1%
145	www.researchgate.net Internet Source	<1%
146	www.scilit.net Internet Source	<1%
147	adityagans.blogspot.com Internet Source	<1%
148	bappeda.kabupatenbatubara.id Internet Source	<1%
149	blog.ub.ac.id Internet Source	<1%
150	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	<1%
151	journal.iain-samarinda.ac.id Internet Source	<1%
152	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1%
153	www.rahmateduc.com Internet Source	<1%

Exclude bibliography Off